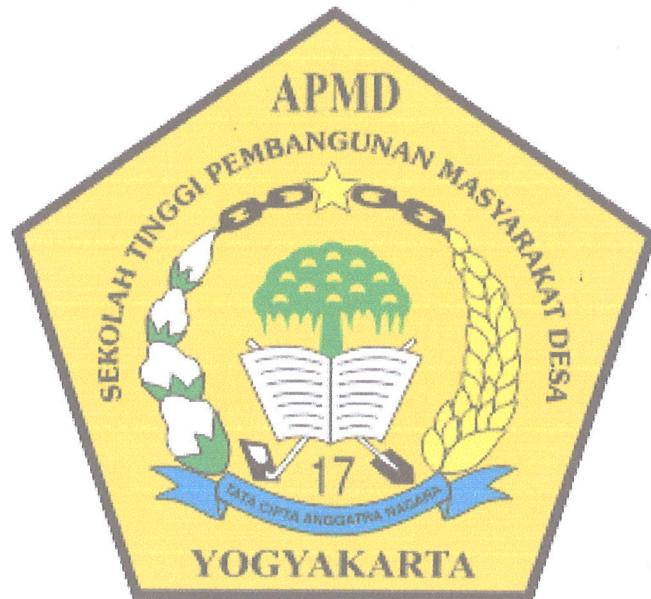


COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

(Penelitian di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi
Tengah)



DISUSUN OLEH:

JERI YANTO

20520078

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2025



HALAMAN JUDUL

***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA
KEUREA, KECAMATAN BAHODOPI, KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI
SULAWESI TENGAH***



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Pengaji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Februari 2025

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Ketua Penguji/Pembimbing



Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A

Penguji Samping I

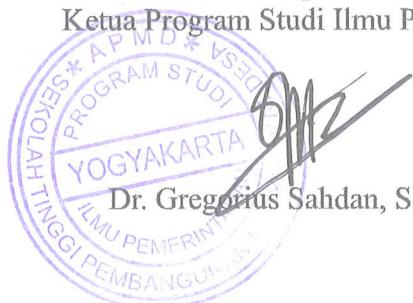


Dr. Rijel Samaloisa

Penguji Samping II

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jeri Yanto
Nomor Induk Mahasiswa : 20520078
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah**" adalah benar-benar hasil kerja dan karya saya sendiri, serta seluruh sumber yang saya kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apa bila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



JERI YANTO
20520078

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Jeri Yanto
NIM : 20520078
Telp : 082236977604
Email : jheriyanto760@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

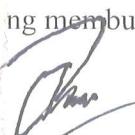
Dengan ini memberikan **ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah (Penelitian di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah)”.

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 18 Februari 2025

ng membuat pernyataan

Jeri Yanto
20520078

MOTTO

Q.S Ali Imran: 173

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebai-baiknya pelindung”

Q.S Al Baqarah: 286

“Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Umar bin Khattab

“Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasehat”

“Hidup adalah pertanyaan dan bagaimana kita menjalaninya adalah jawaban kita”

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT serta atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya Skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah*” dapat diselesaikan dengan baik dan penuh pengorbanan suka maupun duka. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi di Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Dalam rangka persiapan penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukanlah sesuatu yang mudah. Peneliti mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, banyaknya hambatan dan kesulitan yang tentunya disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dan pustaka yang ditinjau. Namun berkat adanya dukungan dan keinginan yang kuat untuk menyelesaikan studi dan ditambah dengan bimbingan dan nasehat dari orang-orang tercinta maka skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya, yakni Ayahanda **Sarman Abdul Razak, Sukirmo dan Jefri Aryanto** serta Ibunda tercinta **Welina Lobo (Alm), Adrina dan Naima** yang selalu menasehati saya dan memberikan curahan kasih sayang, do'a serta kesabaran yang begitu tulus kepada saya. Kemudian kepada Kakak-kakak dan Adik-adik saya tercinta serta Keluarga, semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dan kesehatan.

Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia pada kesempatan ini pula saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Terima kasih kepada Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik peneliti.
4. Terima kasih kepada Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi peneliti yang selama penyusunan skripsi ini selalu sabar dan teliti dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., MA dan Dr. Rijel Samaloisa selaku tim penguji dalam ujian skripsi ini. Masukan dan saran dari beliau membuat penulisan skripsi ini menjadi lebih sistematis dan mendorong peneliti agar lebih cermat menulis skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Keurea dan masyarakat Desa Keurea yang dengan segala keramahan dan perhatiannya membantu peneliti dalam menggali informasi tentang penelitian ini
7. Terima kasih kepada Senior-Senior saya Kanda Aksan, Kanda Amrudin dan Rian Hasman yang selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan informasi-informasi terkait penelitian saya.
8. Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan Martiwi, Hidayat, Taufik, Juargen, Agus, Fisal, Risno dan kawan-kawan lainnya yang saling memberikan dukungan moril serta memberikan kesan yang tak terlupakan dalam menempuh proses

10. Terima kasih kepada kawan-kawan Organisasi IP2MBY, Forum Komunikasi Hijau dan Forum Pemikiran yang senantiasa mendampingi peneliti berdiskusi selama menempuh studi S1.

Yogyakarta, 18 Februari 2025



JERI YANTO
20520078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Literatur Review	7
G. Kerangka Konseptual.....	17
1. Governance	17
2. <i>Collaborative Governance</i>	18
3. Pengelolaan Sampah	20
H. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Unit Analisis.....	22
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Teknik Analisis Data	27
BAB II	29
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KEUREA.....	29
A. Gambaran Umum Desa Keurea	30

B.	Visi dan Misi Desa Keurea	32
C.	Kondisi Geografis Desa Keurea.....	34
D.	Kondisi Demografi Desa Keurea	35
E.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Keurea	39
F.	Kondisi Pemerintahan Desa.....	44
BAB III.....		51
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KEUREA		51
A.	Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Desa Keurea	51
B.	Peran Setiap Aktor Dalam Tahapan Kolaborasi yang diakukan Pemerintah Desa Keurea	63
C.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea	67
BAB IV.....		71
PENUTUP.....		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Rekomendasi.....	74
DAFTAR PUSTAKA		78
PEDOMAN WAWANCARA		80
LAMPIRAN.....		82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan	23
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Desa Keurea.....	35
Tabel 2. 2 Data Jumlah penduduk berdasarkan Kelompok Usia	36
Tabel 2. 3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37
Tabel 2. 4 Jumlah penduduk berdasarkan Agama.....	38
Tabel 2. 5 Data Prasarana Kesehatan Desa Keurea	39
Tabel 2. 6 Data Mata Pencaharian Penduduk	42
Tabel 2. 7 Data Pembagian Wilayah Desa Keurea.....	44
Tabel 2. 8 Susunan Pemerintahan Desa Keurea.....	45
Tabel 2. 9 Data APBDes Desa Keurea Tahun 2024	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Dokumentasi Tumpukan Sampah	3
Gambar 2. 1 Peta Wilayah Desa Keurea	34
Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Keurea	46
Gambar 2. 3 Kendaraan Pengangkut Sampah BUMDes Anunto	49

INTISARI

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang hari ini dihadapi hampir seluruh daerah di Indonesia, bahkan dunia. Peringatan-peringatan mengenai darurat sampah, telah banyak disuarakan di berbagai wilayah begitupun di Desa Keurea. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi antar stakeholder dalam program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Topik ini dipilih karena terdapat keterbatasan ketika aktor bertindak masing-masing dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Desa Keurea. Kolaborasi cenderung dipilih karena cukup efektif dalam menyelesaikan masalah kompleks yang melibatkan berbagai aktor seperti pada program Pengelolaan Sampah.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teknik dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dalam analisis data peneliti menggunakan beberapa tahapan seperti Pengumpulan Data (*data collection*), Penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusions drawing/verifying*). Dalam menyajikan data yang ada, peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi dimana data-data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan dan dilakukan analisis terhadap data tersebut, melihat data mana saja yang dibutuhkan dan akan digunakan setalah itu data yang ada kemudian dianalisis dan kemudian penyajian data kedalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel.

Penelitian ini menunjukan bahwa proses kolaborasi dalam program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea dapat dipahami melalui empat siklus atau tahap dalam kolaborasi: Pertama, dialog tatap muka dilakukan secara langsung dan tidak langsung serta formal dan informal. Kedua, membangun kepercayaan dan komitmen dimana partisipasi masyarakat yang terbentuk setelah adanya pertemuan-pertemuan serta sosialisasi. Ketiga, kesepahaman bersama dimana terdapat kesepakatan bersama dan dukungan konkret dari masing-masing *stakeholder*. Keempat, hasil sementara yang berupa dinamika positif pada program Pengelolaan Sampah dalam upaya mengatasi permasalahan sampah meliputi pengadaan TPS sementara, mobil pengangkut sampah, kontainer sampah dan drum sampah. Dinamika positif ini terjadi melalui adanya penyesuaian program Pengelolaan Sampah yang di dasari oleh aspirasi berbagai *stakeholder* dan kondisi lapangan.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Proses Kolaborasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kolaborasi governance merupakan bagian dari konsep *governance* yang kajiannya memiliki ruang lingkup yang lebih luas, dimana keterbatasan kemampuan, sumber daya, maupun jaringan dalam pelaksanaan program atau kebijakan memaksa suatu organisasi untuk melakukan kerja sama dengan organisasi lainnya, sehingga terbangun kolaborasi. Kolaborasi merupakan suatu pendekatan untuk memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama. Kolaborasi dilakukan tentu memiliki sebuah alasan, kelompok atau organisasi terdorong melakukan kolaborasi karena adanya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, ketidak mampuan kelompok-kelompok, biaya yang tinggi dan politisasi kebijakan.

Hadirnya kerjasama kolaborasi tentu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu kelompok atau organisasi saja, dimana keterbatasan sumberdaya manusia ataupun keterbatasan biaya. Sama halnya ketika berbicara mengenai penyelesaian permasalahan sampah. Masalah persampahan merupakan sebuah tantangan kompleks dan mendesak yang dihadapi Kabupaten Morowali saat ini, terkhusus di Kecamatan Bahodopi. Seiring dengan pertumbuhan populasi urbanisasi yang pesat, dan peningkatan aktivitas industri, produksi sampah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tingginya tingkat konsumsi serta kurangnya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, serta infrastruktur penanganan sampah yang terbatas menjadi faktor yang memperparah masalah persampahan di Kecamatan Bahodopi. Dampak dari masalah persampahan ini tidak hanya terbatas pada lingkungan, tetapi

juga berdampak pada kesehatan masyarakat, kelestarian ekosistem, serta citra pembangunan daerah.

Lingkungan yang tercemar akibat persampahan menyebabkan kerusakan ekosistem dan degradasi lahan, mengancam keberlanjutan sumber daya alam, serta mengurangi keanekaragaman hayati. Tidak hanya lingkungan, dampak dari persampahan yang tidak terkelola dengan baik meliputi penyebaran penyakit melalui pencemaran air dan polusi udara. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya angka penyakit dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Seperti halnya lingkungan dan kesehatan, masalah persampahan juga berdampak negatif pada sektor pariwisata. Lingkungan yang kotor dan tercemar dapat mengurangi minat dan daya tarik pariwisata.

Persampahan di Morowali merupakan wacana serius yang perlu ditangani. Terkhusus di Kecamatan Bahodopi dalam beberapa tahun terakhir, telah menghadapi peningkatan signifikan dalam produksi sampah. Setiap harinya, sampah yang dihasilkan terus meningkat. Grafik sampah perhari menunjukkan selama periode 2014-2022 persentase sampah mengalami peningkatan. Kecamatan Bahodopi pada 2021 mencatat peningkatan signifikan yakni 30 Ton perhari, dibandingkan 2014 yang mencatat 3,5 Ton perhari. Dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Bahodopi, terdapat enam Desa yang paling bermasalah mengenai darurat sampah. Enam Desa yang dimaksut yaitu, Desa Lalampu, Desa Bahodopi, Desa Keurea, Desa Bahomakmur, Desa Fatufia dan Desa Labota. Tren peningkatan timbulan sampah di Kecamatan Bahodopi, khususnya pada enam desa tersebut tidak lepas dari kerangka kerja pembangunan di Morowali. Pertumbuhan penduduk yang signifikan dan urbanisasi yang pesat di Kecamatan Bahodopi yang notabenenya merupakan areal industri tentunya mempengaruhi peningkatan produksi sampah. Dengan bertambahnya jumlah

penduduk, konsumsi dan produksi barang juga meningkat, sehingga menghasilkan lebih banyak timbulan sampah. Tren timbulan sampah di Kecamatan Bahodopi khususnya Desa Keurea, berdasarkan apa yang disampaikan ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Keurea telah mengalami peningkatan yang signifikan, per-tahun 2024 timbulan sampah di Desa Keurea telah mencapai kurang lebih 9 sampai dengan 11 ton per-harinya. Tentu hal ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan jika terus dibiarkan tanpa adanya keseriusan dalam proses pengelolaan sampah yang baik di Desa Keurea.

Gambar 1. 1 Dokumentasi Tumpukan Sampah



Sumber : Dokumentasi Lapangan Tumpukan Sampah Desa Keurea

Gambar diatas peneliti ambil pada saat observasi lapangan, dimana tumpukan sampah pada gambar tersebut terletak di pesisir pantai Dusun II dan di jalan poros Dusun IV. Tidak hanya itu, peneliti juga mengambil dokumentasi gambar tumpukan sampah pada dusun lainnya yang nantinya peneliti akan sajikan dibagian lampiran pada skripsi ini.

Kolaborasi yang efektif tentunya memerluka keseriusan dari berbagai pihak terkait, hal tersebut akan tercipta jika berbagai pihak yang terlibat memiliki koordinasi yang baik dalam melakukan kolaborasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa koordinasi yang

buruk tentunya menghadirkan resiko terjadinya ketidak sesuaian bahkan konflik antar stakeholder dalam program-program pengelolaan sampah. Pendidikan dan kesadaran yang rendah mengenai pentingnya pengelolaan sampah dari pihak yang berwewenang tentunya hal tersebut menyebabkan dilema di masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat seringkali tidak mengikuti aturan-aturan dan praktek pengelolaan sampah yang baik dan benar, hal tersebut terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembakaran sampah yang menyebabkan polusi udara, lebih memilih membuang sampah ke sungai ataupun muara karena tidak tahan dengan pengambilan sampah dari pihak BUMDes yang begitu lama jenjang waktunya sehingga sampah-sampah tersebut membosuk/mencemari udara pekarangan masyarakat. Maka dari itu, upaya-upaya perbaikan proses pengelolaan sampah serta melakukan edukasi kepada masyarakat sangatlah penting dalam menjalankan *collaboratif governance*.

Kemunculan kolaborasi tidak lepas dari keterbatasan kapasitas internal organisasi yang dimiliki. Disatu sisi, upaya berkolaborasi muncul dari ketergantungan antar organisasi yang dipengaruhi oleh masing-masing organisasi memiliki berbagai jenis dan tingkat teknologi serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk melengkapi tugas (Alter & Hage dalam Agranof & McGuire, 2003:35). Sementara pada sisi lain, kolaborasi muncul sebagai alternatif dari sistem pengambilan keputusan yang menyatukan aktor beragam untuk mengatasi masalah-masalah yang begitu kompleks (Innes & Booher, 2010; Margerum, 2011). Dengan tingkat saling ketergantungan ini kemudian memunculkan motivasi untuk berkolaborasi lintas organisasi (Rethermeyer, 2009; Rethemeyer & Hatmaker, 2008).

Collaborative Governance merupakan sebuah gagasan dimana didalamnya mengusung kepentingan dari setiap instansi untuk mencapai kepentingan bersama (Subarsono, 2005, hal.174). menurut Strauss (Noor et al., 2022, hal 21) “collaborasi

mengacu pada proses dimana melibatkan orang ketika mereka bekerja sama dalam sebuah kelompok, komunitas atau organisasi untuk memecahkan masalah, merencanakan dan membuat keputusan”.

Collaborative Governance tentunya dapat meningkatkan tanggung jawab dari para pemangku kepentingan agar berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang tentunya mendorong akuntabilitas, sehingga memastikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai kebutuhan dan nilai didalam masyarakat, karena hal tersebut sangat berdampak langsung pada lingkungan dan kualitas hidupnya. Untuk menciptakan kolaborasi yang efektif tentunya dibutuhkan pembagian informasi yang aktual termaksut juga pertukaran data-data yang transparan. Dengan akses informasi yang akurat mengenai timbulan sampah dan dampak terhadap lingkungan tentunya menjadi hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mendorong pengembangan strategis dalam pengelolaan sampah yang mempertimbangkan berbagai faktor yaitu sosial, lingkungan dan ekonomi sehingga kedepannya dapat menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan.

Berangkat dari hal tersebut, maka inilah yang akan diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Bahodopi khususnya Desa Keurea serta bagaimana dalam proses penanganannya. Melihat dengan melonjaknya timbulan sampah tersebut apakah pihak Pemerintah Desa Keurea dapat mengatasi permasalahan sampah tersebut, dimana bahkan sampai hari ini masih begitu minimnya saran dan prasarana yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, bagaimana pihak Pemerintah Desa dapat mengatasi lonjakan timbulan sampah tersebut tanpa melibatkan sektor lain (swasta) atau dalam hal ini mampukah pihak Pemerintah Desa Keurea mengatasi lonjakan timbulan sampah tanpa melakukan kolaborasi dengan sektor lain (swasta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, serta untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dari permasalahan yang akan diteliti, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Collaborative Governance yang dilakukan Pemerintah Desa Keurea dengan melibatkan secara langsung aktor-aktor yang berkepentingan untuk menghadirkan solusi bersama dalam proses Pengelolaan Sampah ?

C. Fokus Penelitian

Berangkat dari Latar Belakang diatas maka fokus dari penelitian ini yaitu :

1. Proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea.
2. Peran setiap Aktor dalam tahapan *Collaborasi Governance* yang dilakukan Pemerintah Desa Keurea.
3. Fakto pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai proses Collaborasi Governance dalam pengelolaan sampah yang telah dilakukan Pemerintah Desa Keurea. Tujuan kedua yaitu memetakan peran setiap Aktor dari proses Collaborasi Governance dalam pengelolaan sampah yang telah dilakukan di Desa Keurea.

E. Manfaat Penelitian

Berangkat dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti yang sejenis untuk mengembangkan kajian studi kolaborasi yang nantinya dapat menjadi bahan referensi untuk pembelajaran dalam mengembangkan konsep ini.
2. Secara Praktis, diharapkan temuan dari penelitian ini dapat menjadi; (a) masukan kepada Pemerintah Desa Keura terkait proses pengelolaan sampah; (b) memberikan kontribusi bagi Pemerintah terkait dalam pembuatan kebijakan selanjutnya dalam proses pengelolaan sampah dan; (c) memberikan referensi pengetahuan bagi masyarakat tentang kerjasama dan kordinasi antar aktor dalam proses pengelolaan sampah guna mengatasi permasalahan sampah dimana hal ini merupakan salah satu masalah utama yang ada di Desa Keurea.

F. Literatur Review

Penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah pada dasarnya bukanlah sesuatu hal yang baru untuk diteliti, cukup banyak peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Jurnal Ketahanan Nasional yang dilakukan oleh Hidayat Chusnul Chotimah, Muhammad Ridha Iswardhana, Lucitania Rizky, yang berjudul Model *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Maritim di Kepulauan Seribu, Vol. 27 No. 3, Desember 2021 . Penelitian ini berisi tentang pengelolaan sampah plastik di laut dengan menggunakan model *collaborative governance*, pada dasarnya salah satu bentuk ancaman terhadap ketahanan lingkungan maritim di indonesia terkhusus kepulauan seribu adalah pencemaran laut dengan sampah plastik, hal ini tentunya sangat mengancam bagi kelangsungan ekosistem laut, keanekaragaman hayati, kesehatan manusia juga

ketahanan pangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *collaborative governance* dengan membentuk sebuah kerjasama yang melibatkan berbagai pihak baik dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, bahkan organisasi non pemerintah. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut tentunya diharapkan dapat membentuk kolaborasi dengan proses komunikasi yang baik, membangun komitmen, kepercayaan antar pihak serta berbagi pengetahuan sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Kedua, Jurnal Kebijakan Publik yang dilakukan oleh Nilu Eka Puri Setia Wandari, Arimurti Kriswibowo, yang berjudul *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Sampah di Kabupaten, Vol.14, No.2, 2023. Penelitian ini berisi tentang *collaborative governance* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan sampah, ketidak mampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melakukan pengelolaan sampah di TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu), dimana hal tersebut disebabkan dari kurangnya sumber daya dan pengetahuan mengenai keterampilan dalam hal pengelolaan sampah yang dimiliki oleh para pekerja di TPST samataku kabupaten lamongan. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah kabupaten lamongan melakukan upaya *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah, dimana dalam proses pengelolaannya pemerintah kabupaten lamongan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk menciptakan kolaborasi yang baik dalam pengelolaan sampah tentunya dibutuhkan kepercayaan, transparansi dan juga komitmen antar pihak dalam menjalankan kolaborasi tersebut, dengan begitu kerjasama yang baik antar stakeholder dalam pengelolaan sampah di TPST tentunya dapat menjadi solusi dari permasalahan sampah di kabupaten lamongan.

Ketiga, Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia yang dilakukan oleh Djogeh Harmana, Ella L. Wargadinata, Ismail Nurdin, yang berjudul Pengelolaan Sampah

Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Vol. 13, No. 2, Agustus 2021. Penelitian ini berisi analisis mengenai pengolahan sampah yang berbasis *collaborative governance* serta melihat bagaimana peran dari masing-masing stakeholder dalam proses pengelolaan sampah yang berbasis kolaborasi governance di kota tarakan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hubungan kolaborasi, terlihat dari pihak swasta yang hanya menjadi pemberi bantuan dan tidak melakukan partisipasi dalam bentuk yang lain, begitupun dengan masyarakat yang terbilang masih minim dalam hal partisipasi dimana itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang masih saja membuang sampah sembarangan yang tentunya hal tersebut melanggar peraturan yang telah ada. Tentunya hal tersebut membutuhkan upaya lebih dari pemerintah kota tarakan sebagai koordinator dalam pengelolaan sampah untuk melakukan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat dan pihak swasta agar dapat meningkatkan partisipasinya sehingga proses kolaborasi tersebut dapat menjadi solusi untuk permasalahan sampah serta mencapai hasil yang diinginkan bersama.

Keempat, Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan, yang dilakukan oleh Mulkhaeri Ikram, yang berjudul Pendekatan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Kecamatan Manggala, Vol. 3, No. 1, Juli 2020. Penelitian ini berisi tentang proses kolaborasi governane dalam pengelolaan bank sampah, diman hal tersebut lahir dari keterbatasan sumber daya serta keuangan yang dimiliki pihak pemerintah, kolaborasi ini juga merupakan sebuah langkah penunjang untuk keberlangsungan pengelolaan bank sampah. Dalam perjalanan kolaborasi tersebut tentunya dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti melibatkan pihak swasta dan juga masyarakat, dengan menjalin komunikasi yang baik antar pihak dan membangun komitmen yang kuat antar pihak serta menumbuhkan kepercayaan dari pihak-pihak

yang terlibat dalam proses kolaborasi, tentunya hal ini sangat mendukung dalam mencapai konsistensi kinerja dan menyadarkan masyarakat bahwasanya sampah dapat bernilai jual. Proses kolaborasi ini tentunya dibangun dengan tahapan tahapan yang telah direncanakan, diawali dengan membangun komunikasi dengan dialog tatap muka dimana komunikasi dan informasi merupakan poin penting dari keberlangsungan program yang diorientasikan pada kesadaran masyarakat pastinya memerlukan pendekatan komunikasi rutin dan intens kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman bahwasanya sampah memiliki nilai jual. Tahap selanjutnya membangun kepercayaan, dengan menumbuhkan saling kepercayaan antar aktor yang terlibat tentunya hal ini merupakan poin penunjang keberhasilan program. Lalu membangun komitmen, dengan komitmen yang kuat antar aktor dapat membangun motivasi untuk berpartisipasi atau terlibat langsung dalam proses kolaborasi.

Kelima, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) yang dilakukan oleh Idris, Dian Herdiana, Iqbal Miftakhul Mujtahid, dengan judul *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Kecamatan Tiga Barat Kabupaten Natuna, Vol. 6, No. 3, Juli 2022. Penelitian ini berisi tentang hasil dari proses kolaborasi governance dalam pengelolaan sampah yang dilakukan di yang dilakukan di kecamatan pulau tiga barat yang telah berjalan cukup baik, dimana hal tersebut dapat dilihat dari *starting condition* yang sudah cukup baik, *collaborative process* dengan melibatkan LSM, komunitas serta masyarakat, *facilitative leadership* dengan adanya edaran-edaran secara berkala mengenai pengelolaan sampah. Walapun pada sisi yang lain masih terdapat kekurangan dalam hal *institutional design* yang dimana kurangnya bantuan materil, serta peran LSM haruslah berjalan sesuai kebijakan yang berlaku, termasuk juga belum masifnya dilakukan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan kerjasama dalam pengelolaannya. Dalam pelaksanannya

terdapat pula faktor penghambat dalam proses kolaborasi ini seperti financial dimana penganggaran pengelolaan sampah dari DLH ke pihak Kecamatan Pulau Tiga Barat telah tersedia tetapi tidak mencukupi, tentunya hal disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menciptakan devisit. Kemudian situasi krisis dimana kesulitan yang dihadapi yakni rentang pulau-pulau yang menyebabkan kesulitan dinas untuk mengambil sampah di setiap kecamatan dan hal ini belum mendapat perhatian dan alokasi khusus dari pemerintah pusat.

Keenam, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik yang dilakukan oleh Tyas Ayu Puspita, Kelvin Edo Wahyudi, dengan judul *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kabuoaten Jombang, Vol. 5, No. 3, Tahun 2023. Penelitian ini berisi tentang permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Jombang, dimana Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan kolaborasi governance dalam melakukan penangan permasalahan sampah tersebut, dalam proses kolaborasi governance ini melibatkan antar pemerintah, LSM, serta masyarakat. Dimana setiap pemangku kepentingan yang terlibat telah menjalankan perannya dengan cukup baik dengan melihat tahapan-tahapannya, mulai dari identifikasi hambatan dan peluang yang dilakukan dinas lingkungan hidup kabupaten jombang dan (FMMJ) Forum Masyarakat Madani Jombang dibawah naungan LSM Sanggar Hijau Indonesia sudah tercermin secara baik. pada tahapan kedua, Strategi debat dilakukan untuk memengaruhi telah dilakukan cukup baik agar tetap konsisten dalam melakukan perencanaan dengan membuat *policy brief* serta melibatkan lima elemen yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Terakhir merencanakan tindakan kolaborasi yang telah dilakukan cukup baik oleh para pemangku kepentingan, melihat dari penerapan *policy brief* yang disosialisasikan pada keseluruhan elemen di kabupaten jombang, tentunya

dengan harapan kolaborasi yang dilakukan ini dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Ketujuh, Indonesian Journal Of Education And Humanity, yang dilakukan oleh Imang Firmansyah, Rustandi, Basuki Rahmat, dengan judul *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya, Vol. 3, No. 4, November 2023. Penelitian ini berisi tentang pengelolaan dan penanganan permasalahan sampah di kota Tasikmalaya dengan menggunakan proses *collaborative governance*, dengan melibatkan pemda tasikmalaya, swasta, LSM dan masyarakat. Melalui kolaborasi tentunya menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan sampah seperti pendauran ulang sampah, pengurangan limbah dan teknologi yang raham lingkungan. Melakukan kolaborasi dengan pihak swasta juga tentunya membawa dampak positif dalam hal bisnis dengan menghadirkan model bisnis yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada dana publik. Kolaborasi governance ini jika dilakukan dengan baik tentunya sangat membantu pemerintahan kota tasikmalaya dalam mengatasi permasalahan sampah. *Collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di kota tasikmalaya menghadapi berbagai masalah umum yang mempengaruhi keberhasilannya, diantaranya pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi, seperti pemerintah daerah, lembaga swasta, LSM, dan masyarakat, kurang memiliki tingkat kekuasaan yang tidak seimbang, dimana dapat membuat salah satu pihak mendominasi proses dan mengabaikan masukan dari pihak lain. Teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengelolaan sampah yang efektif, dimana hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan sampah di kota tasikmalaya, serta tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dalam proses pengelolaan sampah, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Kedelapan, Journal Of Politic And Government Studies, yang dilakukan oleh Maulana Fajar Gimnastiar, Teguh Yuwono, Neny Marlina, dengan judul Implementasi *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Penelitian ini berisi tentang bagaimana tahapan dan faktor keberhasilan dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Indria Jaya kelurahan kalipancur kota semarang. Program bank sampah dalam pengelolaan sampah selain mengurangi timbulan sampah yang ada, juga sebagai upaya dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat. Program ini merupakan perwujudan dari collaborative governance, karena dalam prakteknya program ini dilaksanakan dengan bentuk kerjasama antar pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Dalam tahapannya proses *collaborative governance* bank sampah indria jaya memiliki beberapa tahapan; (a) *Assesment*/penilaian merupakan sebuah langkah awal dari proses kolaborasi dimana tahap ini menjelaskan mengenai kondisi awal dimana merupakan faktor kunci yang juga menentukan keberhasilan kolaborasi yang akan dilakukan antar stakeholder; (b) *Initiation*/permulaan ini bertujuan agar antar stakeholder dapat membangun komitmen untuk bekerjasama, dimana tahap ini dilaksanakan dengan membentuk sebuah kelompok agar antar stakeholder berpartisipasi dalam proses kolaborasi; (c) *Deliberation*/musyawarah tahapan ini memiliki tujuan untuk pencapaian pemahaman bersama tentang permasalahan, mengidentifikasi solusi yang berpotensi dan merumuskan tindakan bersama yang akan diambil melalui diskusi; (d) *Implementation* merupakan tahapan terakhir yaitu pelaksanaan tugas-tugas yang telah disepakati oleh aktor yang terlibat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari *collaborative governance*, tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan program ini tentunya dipengaruhi berbagai faktor seperti *networked structure*/struktur jaringan antar aktor, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan yang ada antar aktor juga merupakan

penunjang keberhasilan, governance dengan melihat mana yang menjadi elemen utama dan mana yang menjadi elemen tambahan, kemudian pembagian tanggung jawab haruslah ditetapkan dengan jelas agar efektifitas kerja tercapai, pembagian informasi yang akurat dan transparan juga penting dalam keberhasilan, dan yang terakhir yaitu akses terhadap sumber daya sehingga kepengurusan lebih efektif dan mencapai hasil yang maksimal.

Kesembilan, Jurnal Governansi, yang dilakukan oleh Cecep Wahyudin, Oetje Subagdja, Abubakar Iskandar, dengan Judul Desain Model Collaborative Governance dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik, Vol. 9, No. 2, Oktober 2023. Penelitian ini berisikan tentang rancangan model *collaborative governance* dalam upaya pengurangan penggunaan sampah plastik, konsep collaborative governance ini tentunya berorientasi pada proses yang di dalamnya melibatkan berbagai aktor secara konstruktif dengan tindakan-tindakan yang dilakukan masing-masing aktor yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam upaya mengurangi penggunaan sampah plastik dimana hal tersebut tentu sangat mempengaruhi kenyamanan, kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Dalam upaya pengurangan sampah plastik tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menggunakan pendekatan proses kolaborasi dimana pendekatan ini mencangkup beberapa dimensi, (a) Dinamika kolaborasi, kerjasama antar aktor yang dilakukan DLH, pelaku usaha/swasta dan masyarakat menjadi sebuah bentuk siklus interaksi yang menjadi dasar dari upaya pengurangan penggunaan sampah plastik. (b) Tindakan-tindakan kolaborasi, hal ini ditandai dilakukannya terus menerus menjaga upaya kelangsungan tindakan pengurangan penggunaan sampah plastik agar terus berjalan dengan baik. (c) Dampak dan adaptasi hasil tindakan, dampak yang dihasilkan dari proses kolaborasi antar aktor tersebut ditandai dengan beberapa upaya seperti diberlakukannya pengurangan penggunaan

plastik di toko-toko, pasar tradisional dan sejenisnya, serta diharuskannya pembelian kantong plastik dengan harga yang lebih mahal. Kemudian adaptasi yang dilakukan, terlihat dari respon pelaku usaha dan masyarakat yang tentunya menyesuaikan dengan kondisi tengah diberlakukan saat ini, sikap, prilaku dan partisipasi dari pelaku usaha dan masyarakat yang antusias dalam melakukan upaya pengurangan sampah tentunya menjadi penopang keberhasilan program kolaborasi. Berangkat dari hal tersebut Pemerintah menyadari bahwa hal ini dibutuhkan kolaborasi antara (SKPD) satuan kerja perangkat daerah dengan SKPD lainnya, SKPD dan swasta, masyarakat dan SKPD, maupun swasta dan masyarakat. Dengan ini tentunya dapat menciptakan suatu kerjasama yang membawa perubahan signifikan dalam proses pengurangan penggunaan sampah plastik.

Kesepuluh, Jurnal Inovasi kebijakan, yang dilakukan oleh Alfian Deby Artha, Heru Nurasa, Candradewini, dengan Judul Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, Vol. 7, No. 1, Mei 2023. Jurnal ini berisi tentang bagaimana kolaborasi yang dibangun antar stakeholder dalam proses pengelolaan sampah termasuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi yang dibangun antar stakeholder, serta melihat dan mengoptimalkan peluang yang ada guna meningkatkan kinerja dari pengelolaan sampah. Konsep pengelolaan sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat yaitu dengan melibatkan langsung berbagai stakeholder/aktor seperti DLH, Pemerintah Nagari, masyarakat, swasta, dan LSM. Analisis stakeholder dalam pengelolaan sampah nagari tentunya harus mengidentifikasi stakeholder yang tentunya relevan dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah nagari seperti; (a) Bupati/Kepala Daerah yang tentunya memiliki power yang besar mengenai implementasi kebijakan; (b) Komisi III DPRD selaku pemegang fungsi legislatif serta anggaran dan pengawasan; (c) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

yang tentunya bertanggung jawab dari implementasi pengelolaan nagari; (d) DPMN yang menjadi penanggung jawab program serta menjadi pengawas kegiatan yang dilakukan pemerintah nagari; (e) Pemerintah Nagari yang memiliki pengaruh besar karena proses pengumpulan dan pemilahan sampah, pengankutan ke TPS, pengelolaan, melakukan pelatihan dan pembinaan serta memberikan sosialisasi; (f) Masyarakat, swasta dan LSM yang merupakan garda terdepan dari proses pengelolaan sampah itu sendiri.

Dari identifikasi dan pemetaan stakeholder, proses kolaborasi tersebut belum mampu berjalan dengan efektif karena disebabkan tidak maksimalnya dukungan dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, ditambah lagi dengan keterbatasan anggaran yang ada, minimnya sarana dan prasarana serta keterbatasan wewenang secara organisasi sehingga kolaborasi yang terbangun antara stakeholder belum mampu memberikan pelayanan pengelolaan sampah yang maksimal di seluruh kecamatan yang ada. Ditambah begitu minimnya upaya penyuluhan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan yg dilakukan DLH kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah sehingga menyebabkan kekurangan informasi dan pengetahuan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, tentunya memiliki relevansi dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Mengenai persamaan dalam penelitian ini dengan melihat hasil penelitian terdahulu diatas yaitu, menjelaskan tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah, mulai dari peran Pemerintah dalam pengelolaan sampah, Sektor Swasta serta peran Masyarakat mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah.

Kemudian mengenai perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas yaitu lokasi penelitian, kemudian fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus

pada Tahapan Kolaborasi, Pemetaan Stakeholder, Proses Kolaborasi serta Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat terhadap *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea, dalam upaya penanganan permasalahan sampah yang terjadi di Desa Keurea.

G. Kerangka Konseptual

1. Governance

Konsep *Governance* sejatinya berangkat dari istilah *Government*, Konsep *Government* dapat juga dikatakan sebagai konsep lama karena dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya terfokus pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah, berangkat dari hal itulah muncul konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek maupun kajian pemerintahan. *Governance* itu sendiri berasal dari kat “govern” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Adapun Teguh Kurniawan (2007), yang menerangkan bahwa konsep *governance* merupakan sebuah proses kebijakan yang dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah, sektor private (swasta) maupun masyarakat. Hal demikian sejalan dengan yang dikemukakan Dwiyanto, (2018:61-62) bahwa keterlibatan banyak organisasi dan aktor dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menanggapi persoalan publik merupakan penekanan utama dari studi *governance*. Dengan hal tersebut dapat digambarkan bahwa keterlibatan berbagai stakeholder dalam mengatur, mengurus urusan, dan kepentingan publik merupakan konsep kunci dari penekanan studi *governance*. Kemudian Menurut Chema dalam Keban (2008), *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan

kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian diatas yaitu, *Governance* merupakan keterlibatan tiga (3) sektor, Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat yang dalam prosesnya menghasilkan kebijakan untuk mengelola dan mengatasi permasalahan Publik, tentunya dengan hal tersebut dapat digambarkan bahwa keterlibatan berbagai stakeholder dalam mengatur, mengurus urusan, dan kepentingan publik merupakan konsep kunci dari penekanan studi *governance* sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan bersama.

2. *Collaborative Governance*

Collaborative Governance merupakan sebuah proses dalam merumuskan sebuah keputusan kebijakan dimana hal tersebut tentunya dilakukan dengan melibatkan secara langsung aktor-aktor yang berkepentingan baik itu dalam tataran Pemerintah, sektor Swasta dan elemen masyarakat dengan bentuk musyawarah dan dalam mengambil keputusan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Kemunculan kolaborasi tidak lepas dari keterbatasan kapasitas internal organisasi yang dimiliki sebuah organisasi. Fokus *collaborative governance* berada pada kebijakan dan permasalahan publik, maka dari itu *collaborative governance* sangat menginginkan terpenuhinya kebutuhan publik dalam rangka mewujudkan sebuah keadilan sosial. Upaya berkolaborasi muncul dari ketergantungan antar organisasi yang dipengaruhi oleh masing-masing organisasi memiliki berbagai jenis dan tingkat teknologi serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk melengkapi tugas. Sementara pada sisi lain, kolaborasi muncul sebagai alternatif dari sistem pengambilan keputusan yang menyatukan aktor beragam untuk mengatasi masalah-masalah yang begitu kompleks (Innes & Booher, 2010; Margerum, 2011). Dengan tingkat saling ketergantungan ini

kemudian memunculkan motivasi untuk berkolaborasi lintas organisasi (Rethermeyer, 2009; Rethemeyer & Hatmaker, 2008).

Kunci kolaborasi merujuk pada hubungan yang sengaja direncanakan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menciptakan atau menemukan solusi. Hal tersebut dibenarkan oleh Agranof et al, bahwa kolaborasi merupakan bentuk pencarian alternatif dari permasalahan yang dihadapi setiap organisasi.

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008). Robertson dan Choi (Wardi, Warsono 2020) mengatakan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses kolektif dan keyakinan tentang persamaan hak dimana setiap partisipan yang terdapat didalamnya memiliki otoritas dalam proses pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasinya dalam proses tersebut.

Proses kolaborasi merupakan suatu proses dimana didalamnya dapat ditemukan suatu dialog yang membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang disepakati secara bersama (Islamy, 2018). Proses kolaborasi yang digambarkan merupakan tahap pengembangan kesepakatan yang menjelaskan bagaimana fase-fase program kolaborasi dilaksanakan mulai dari fase pra negosiasi, fase negosiasi, sampai pada fase implementasi program. Sehingga keberhasilan kolaborasi bergantung bagaimana siklus kolaborasi itu berputar mulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan dan komitmen, berbagi pemahaman, sampai pada hasil yang ingin dicapai (Ansell & Gash, 2008) dalam (Islamy, 2018).

Dialog tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antar aktor kolaborasi yaitu dengan melakukan interaksi secara tatap muka, sehingga munculnya persamaan ruang dalam memperoleh informasi, dialog tatap muka juga menjadi alat untuk membangun komitmen dan kepercayaan dalam proses kolaborasi. Membangun kepercayaan dan komitmen merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan merupakan hal yang memakan waktu yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai sebuah kolaborasi. Berbagi pemahaman atau kesepahaman bersama perlu dilakukan pada setiap hal, baik itu pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun pada saat evaluasi kegiatan. Kesepahaman bersama antar stakeholder selaras dengan kepercayaan dan komitmen, pada saat itu stakeholder mempunyai kepercayaan dan komitmen, maka dengan mudah stakeholder yang berkolaborasi akan mempunyai kesepahaman bersama. Lalu yang terakhir yaitu hasil sementara, dimana hal ini merupakan sebuah hasil dari kegiatan usaha yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat, dan merupakan indikator dari hasil jangka panjang (Islamy, 2018).

Dengan demikian peneliti dapat memahami dan memberikan kesimpulan bahwa *collaborative governance* merupakan proses pencarian solusi yang diwujudkan dalam bentuk forum bersama, dimana dengan menghadirkan setiap pemangku kepentingan meliputi sektor pemerintah, swasta atau privat dan masyarakat untuk saling berbagi sumberdaya yang dimiliki, bermusyawarah, serta membagi tugas demi mencapai tujuan kolektif yang telah disepakati dan ditetapkan.

3. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan berasal dari kata kelola yang artinya memimpin, mengatur, mengendalikan, mengusahakan serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai

sebuah proses yang membantu untuk merumuskan kebijakan serta bertujuan melakukan/memberikan pengawasan terhadap segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam pencapaian tujuan. Pengelolaan sampah juga dapat dikatakan sebagai langkah awal pencapaian target dalam agenda pembangunan berkelanjutan, karena hal ini merupakan sebuah kegiatan terpadu yang tentunya memiliki dampak terhadap berbagai aspek dalam masyarakat dan ekonomi. Sampah tentunya sangat membawa dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, seperti pencemaran tanah dan air serta terancamnya ekosistem laut dan darat. Sehingga pengelolaan sampah dikatakan sangat berkaitan dengan isu kesehatan masyarakat, pengurangan kemiskinan, isu perubahan iklim, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan. Menurut (UU No. 18/2008) pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dimana pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah adalah kegiatan untuk mengelola sampah dimulai dari proses pengumpulan, proses pengangkutan, proses pengeolahan, hingga proses pembuangan yang disertai monitoring dan didasari regulasi management sampah (Waste Management, 2021).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang menjadi objek penelitian ini, sehingga peneliti dapat menjelaskan kondisi empiris dilapangan mengenai bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea. Pada dasarnya, penelitian kualitatif seringkali digunakan untuk

memahami fenomena sosial. Moleong, (2018:6) menerjemahkan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti seperti perilaku dan tindakan. Hal ini sejalan juga dengan apa yang dikatakan Creswell, (2019:4) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengesplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang didapatkan bukan melalui kuisioner melainkan dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih menekankan segi proses dibandingkan hasil yang didapat, hal tersebut disebabkan oleh hubungan dari bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati bagaimana proses pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Desa Keurea, melihat alternatif atau solusi apa yang dihadirkan Pemerintah Desa Keurea mengenai permasalahan sampah yang begitu kompleks di Desa Keurea, melihat sejauh mana keterlibatan para aktor pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan sampah di Desa Keurea serta bagaimana bentuk kerjasama yang terbangun antar pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi bagi permasalahan sampah tersebut.

2. Unit Analisis

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu, proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi

Sulawesi Tengah. Berdasarkan dari pengamatan peneliti dari proses pengelolaan sampah yang ada di pulau jawa terkhusus di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), berangkat dari pengamatan tersebut maka peneliti terdorong untuk meneliti proses serta faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea.

c. Subjek Penelitian

Subyek dari penelitian ini merupakan entitas atau satuan-satuan yang tentunya berkaitan dengan obyek penelitian. Dimana subjek penelitian ini melihat bagaimana kerjasama kolaborasi antara Pemerintah Desa Keurea, Pengurus BUMDes Anunto, Perwakilan Divisi Persampahan PT. IMIP, Tokoh Masyarakat, Karangtaruna, Organisasi atau Komunitas dan masyarakat.

Tabel 1. 1 Data Informan

NO	NAMA	JABATAN
1.	HUSNI ABDUL WAHAB	Kepala Desa Keurea
2.	MOHAMMAD RIZAL	Ketua BPD Desa Keurea
3.	SUPARNO	Sekretaris Desa Keurea
4.	HARIADI	Ketua BUMDes Anunto
5.	ABDUL RAHIM	Sekretaris BUMDes Anunto
6.	TEWEL	Div. Eks Persampahan PT. IMIP
7.	AMRUDIN	Tokoh Masyarakat
8.	RIAN HASMAN	Wakil Ketua Karangtaruna
9.	RIAN ADIPUTRA	Ketua OPLH AGATHIS
10.	SNARDIN	Masyarakat
11.	HANG BURHAN	Masyarakat
12.	KORE JEFRY SAMSUDIN	Masyarakat

13.	HANG BURHAN	Masyarakat
14.	RAHMA WATI	Masyarakat

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, sumber data merupakan indikator yang sangat penting dalam sebuah rangkaia penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini diiringi dengan dua jenis perolehan data, yaitu data primer dan data sekunder. Secara singkat, data primer merupakan data utama yang didapatkan secara langsung dari informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini untuk menggali informasi dan data, mengenai informan yang dimaksut tentunya peneliti melakukan pemilihan informan yang merupakan upaya dalam mempertimbangkan hal-hal tertentu, seperti orang yang dianggap paham untuk menjelaskan proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan jenis data yang berasal dari dokumen dan laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data yang dimaksut dapat terwakili melalui format lisan maupun narasi, berbentuk deskripsi kata-kata yang dilengkapi dengan gambar, peta, table dan lainnya dalam menambah kualitas informasi yang diperoleh, atau dengan kata lain hal ini dapat pula disebut dengan data kualitatif.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, tentunya dibutuhkan teknik pengumpulan data yang harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui :

a. Wawancara

Wawancara di dalam penelitian digunakan sebagai salah satu bagian dari pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada informan penelitian jika peneliti ingin mengetahui informasi secara mendalam (Sugiyono, 2021: 195). Pada

saat wawancara, beberapa pertanyaan lebih bersifat terbuka dan semi-terstruktur, tujuannya agar sudut pandang dari informan dapat menyalurkan pendapat dan idenya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Agar mampu mendapatkan sudut pandang yang lebih konferhensif tentang proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea, maka informan yang diwawancarai mencangkup Pemerintah Desa dan Non-Pemerintah Desa Keurea.

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan narasumber-narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti, dalam wawancara tersebut peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan judul skripsi peneliti. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti tentu bersifat sederhana dan mudah dipahami, sehingga narasumber dapat bercerita ataupun memberikan tanggapannya mengenai pengelolaan sampah di Desa Keurea secara detail. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber tersebut tentu membutuhkan waktu dan tempat yang berbeda-beda, dalam proses wawancara ini peneliti berupaya melakukan dialog tanya jawab yang santai dengan narasumber agar peneliti dapat mengetahui dengan jelas pelaksanaan program pengelolaan sampa di Desa Keurea.

b. Observasi

Teknik ini merujuk pada membandingkan antara ciri yang spesifik dalam pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data lainnya (Sugiyono, 2021:203). Bagi Creswell (2019:254) observasi merupakan suatu kegiatan pengambilan catatan tentang perilaku dan kegiatan individu di lokasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk melihat dan mengamati *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea.

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui observasi, dimana peneliti melakukan observasi terhadap Desa Keurea. Dimana peneliti melihat bagaimana Pemerintah Desa melakukan pengelolaan sampah dalam upaya penanganan permasalahan sampah di Desa Keurea. Pelaksanaan program pengelolaan sampah di Desa Keurea dilakukan oleh BUMDesa Anunto, dimana BUMDes yang merupakan badan usaha desa ditunjuk sebagai pelaksana atau eksekutor program pengelolaan sampah ini dalam rapat atau pertemuan formal yang dilakukan Pemerintah Desa dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, PKK, Karangtaruna serta masyarakat secara umum. Dalam proses observasi ini peneliti melakukan observasi secara langsung di Desa Keurea.

c. Dokumentasi

Dokumen digunakan pada penelitian sebagai sumber data. Karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan (Moleong, 2018:217). Dokumen digunakan pada penelitian ini sebagai data pendukung dan juga pembuktian lainnya dalam bentuk dokumen. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini ditujukan untuk menggali data sekunder tentang dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea.

Pada tahap pengumpulan data melalui dokumentasi ini, disini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai pelaksanaan program pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Desa ataupun BUMDes Anunto sebagai eksekutor, mulai dari tren timbulan sampah di Desa Keurea, pengalokasian anggaran untuk program pengelolaan sampah, bantuan-bantuan dari stakeholder

lain, serta sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan program pengelolaan sampah di Desa Keurea.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan pemikiran terus menerus terhadap data, mengutarakan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat selama Penelitian (Croswell 2019:260). Analisis data merupakan salah satu tindak lanjut atas data penelitian yang telah ditemukan dilapangan. Analisis data dilakukan pada data yang telah terhimpun baik secara primer berupa hasil wawancara, observasi dan sekunder yang berupa dokumen dan arsip-arsip untuk selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis. Secara spesifik, Moleong (2018:248) mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif tidak lepas dari suatu proses yang dilakukan dengan dengan cara mengerjakan dan mengorganisasikan data, serta memilih data menjadi komponen yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, mempersatukan data dan menemukan apa yang dapat dinarasikan lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan pada tahap yang digambarkan Miles et al., (2014;14) yang meliputi empat tahap diantaranya : Pengumpulan Data (*data collection*), Penyajian Data (*data display*), Kondensasi Data (*data condensation*), serta Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusions drawing/verifying*).

a. Pengumpulan Data (*data collection*)

Pengumpulan data diawali dengan mewawancarai beberapa informan kunci guna memperoleh informasi penting tentang fokus penelitian, peneliti melakukan pengumpulan dokumen resmi yang paling mengetahui terkait fokus penelitian, melakukan pengamatan lapangan tentang kondisi lapangan serta informasi-informasi lain yang dianggap perlu.

b. Penyajian Data (*data display*)

Tahap selanjutnya merupakan pengambaran data yang telah dikumpulkan, sebagaimana persiapan dalam melakukan analisis data. Disini peneliti dengan menyajikan data maka akan mempermudah peneliti dalam memahami mengenai apa yang terjadi, sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusions drawing/verifying*)

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni membangun kesimpulan sementara yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian dari data-data yang dikumpulkan. Perumusan kesimpulan yang bersifat sementara, dalam hal ini juga bersifat terbuka dan menyikapinya secara detail untuk dilakukan verifikasi secara berkelanjutan guna mendukung suatu kesimpulan yang lebih rinci dan mengakar, atau dapat dikatakan dalam hal ini penelitian melakukan triangulasi data.

BAB II

PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KEUREA

Desa Keurea, hari ini telah mengalami peningkatan produksi sampah yang sangat signifikan. Dimana hal tersebut telah menjadi persoalan yang mendesak dan harus ditangani dengan proses pengelolaan sampah yang baik. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti peningkatan produksi sampah yang sangat signifikan tersebut tidak terlepas dari tingginya tingkat populasi akibat dari aktivitas industri. Sampah-sampah di Desa Keurea sebagian besar merupakan sampah industri, dimana sampah tersebut dihasilkan oleh karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan industri dan sebagian lagi sampah rumah tangga. Tercatat bahwa pertahun 2024 timbulan sampah di Desa Keurea telah mencapai kurang lebih 9 sampai dengan 11 ton per-harinya dan untuk Data Dinas Lingkungan Hidup Morowali per-januari 2025 memperkirakan, total produksi sampah di wilayah Kecamatan Bahodopi mencapai 137 ton setiap hari. tentu angka ini untuk skala desa telah menjadi menjadi sebuah permasalahan yang mendesak dan perlu mendapatkan tindak lanjut yang serius dari pihak pemerintah Desa Keurea, mengingat hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dan juga lingkungan.

Dalam upaya penanganan permasalahan sampah di Desa Keurea, Pemerintah Desa Keurea menghadirkan program pengelolaan sampah dimana BUMDes sebagai pelaksana atau eksekutor dari program tersebut. Dalam upaya penanganan permasalahan sampah tersebut tentu diperlukan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan program pengelolaan sampah di Desa Keurea, sejauh ini dimana sarana dan prasarana tersebut berupa pengadaan TPS sementara, mobil pengangkut sampah, motor pengangkut sampah serta drum-drum sampah yang ditempatkan di tiap-tiap dusun. Melihat sarana dan prasarana yang ada, tentu hal tersebut belum dapat dikatakan memadai untuk program pengelolaan sampah. Sehingga berangkat dari hal tersebut, maka diperlukan adanya upaya kerjasama kolaborasi yang dibangun oleh

Pemerintah Desa Keurea untuk memenuhi keterbatasan-keterbatas sarana dan prasarana yang dimiliki hari ini.

A. Gambaran Umum Desa Keurea

Desa Keurea merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan sejarah yang ada pada awalnya Desa Keurea masuk kedalam wilayah administratif Desa Bahodopi (Desa Gabungan) dimana pada saat itu Desa Bahodopi di bawah kepemimpinan Kepala Desa Bapak MASALUHU. Kemudian pada tahun 1966 Desa Keurea dimekar menjadi satu desa definitif yang kemudian di pimpin oleh Kepala Desa yang Bernama Bapak MOH. ALI. Dalam perkembangannya sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang Desa Keurea telah dipimpin oleh sepuluh (10) Kepala Desa, dimana nama dan masa jabatan Kepala Desa Tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1966 - 2000 : MOH.ALI
2. Tahun 2000 - 2001 : H. DARSON
3. Tahun 2001 - 2005 : ISHAK
4. Tahun 2005 - 2007 : H. SIKIN
5. Tahun 2007 - 2010 : ABU BAKAR M. ALI (pelaksana tugas/Plt Kepala Desa)
6. Tahun 2010 - 2011 : MUKHRIM (pelaksana tugas/Plt Kepala Desa)
7. Tahun 2011 - 2017 : ARIFUDIN M. ALI
8. Juli 2017 – November 2017 : AHYAR AMINUDIN (pelaksana tugas/Plt Kepala Desa)
9. Tahun 2017 - 2023 : DAMRAN. D
10. Tahun 2023 - Sekarang : HUSNI ABDUL WAHAB

Nama Keurea itu sendiri menurut orang tua terdahulu berasal dari kata “Keu” yang artinya adalah kayu dan “Rea” yang artinya adalah darah, jadi nama Keurea dapat diartikan sebagai “Suatu wilayah yang banyak ditumbuhi kayu berdarah atau bergetah

merah". Desa Keurea tentunya sama seperti desa-desa lainnya yang berada di Kecamatan Bahodopi dengan keunikan dan daya tariknya masing-masing, pada dasarnya masyarakat Desa Keurea hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bercocok tanam di lahan pertanian dan juga melaut menjadi nelayan. Namun seiring berjalannya waktu dengan maraknya industri yang hadir karena kekayaan sumber daya alam dalam hal ini Nickel, perlahan hal tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan beralihnya mata pencaharian masyarakat setempat, banyak lahan-lahan pertanian yang telah dikonversi menjadi lahan-lahan industri sehingga membuat masyarakat yang dulunya berprofesi sebagai petani/berkebun beralih menjadi buruh pabrik, hal tersebut juga memiliki dampak besar terhadap para nelayan dimana maraknya aktivitas industri pertambangan yang membuang limbahnya langsung kelaut hal tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan memaksa para nelayan untuk keluar lebih jauh agar dapat mendapatkan ikan, sehingga seiring berjalannya waktu banyak para nelayan yang juga beralih profesi sebagai buruh pabrik.

Terlepas dari hal tersebut tentu tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya industri tentu membuka banyak peluang usaha bagi masyarakat sekitaran industri, melihat peluang tersebut tentunya masyarakat Desa Keurea tidak hanya terfokus keprofesi buruh pabrik. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang begitu besar tentunya menarik begitu banyak orang-orang dari berbagai daerah sehingga menyebabkan lonjakan penduduk yang begitu besar, adanya peluang tersebut banyak masyarakat yang memiliki lahan diperkampungan berminat membangun kos-kossan untuk disewakan sebagai tempat hunia bagi para pekerja yang berasal dari luar Desa Keurea. Disisi lain ada pula masyarakat desa keurea yang menjadi suplayer dan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menjadi penyedia bahan pokok untuk

dapur-dapur perusahaan, serta ada pula UMKM yang dijalankan masyarakat desa keurea sebagai sumber mata pencaharian mereka.

B. Visi dan Misi Desa Keurea

1. Visi Desa Keurea

Visi Desa Keurea merupakan pondasi awal dalam menentukan arah Pembangunan Desa Keurea kedepannya, diman Visi Desa Keurea tentunya berangkat dari hasil pengamatan dan analisis Kepa Desa terpilih mengenai kondisi desa dan isu-isu strategis yang ada di Desa Keurea. Visi Desa Keurea yaitu “Membangun Desa Keurea yang lebih maju dan sejahtera bersama” visi ini tentunya memiliki makna yang meliputi berbagai bidang di Desa Keurea, seperti Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kemasyarakatan.

2. Misi Desa Keurea

Seperti yang telah diketahui pada umumnya, misi merupakan penjabaran atau pemaparan dari sebuah visi. Sama halnya dengan misi Desa Keurea yang tidak lain merupakan penjabaran dari visi Desa keurea itu sendiri, dimana misi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan

- Mengoptimalkan peran aparat pemerintah desa untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
- Penertiban data penduduk dan administrasi pertanahan.
- Peningkatan dan penguatan kemampuan serta pengetahuan aparatur desa melalui bimbingan teknis.
- Memaksimalkan fungsi koordinasi dan kerjasama BPD

b. Bidang Pembangunan

- Pengadaan serta peningkatan sarana dan prasarana desa dengan skala prioritas untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat.
- Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di desa.
- Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi dan peran BUMDes dalam rangka menambah dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

c. Bidang Kemasyarakatan

- Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentungan umum desa.
- Mengedepankan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan Pembangunan.
- Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Menghidupkan serta mengoptimalkan peran serta pemuda melalui karang taruna desa dalam mendukung kinerja pemerintah desa dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
- Membuka peluang pemberdayaan perempuan melalui PKK.
- Memberikan dan meningkatkan dukungan fasilitas pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat.
- Memelihara dan melestarikan serta meningkatkan nilai-nilai kerohanian/agama yang ada dalam masyarakat serta mengupayakan peningkatan insentif imam, pegawai sara dan guru mengaji.
- Menjalin kerjasama dan komunikasi antar berbagai golongan, suku, agama, budaya, budaya dan ras, demi mewujudkan Desa Keurea yang aman dan tertib.

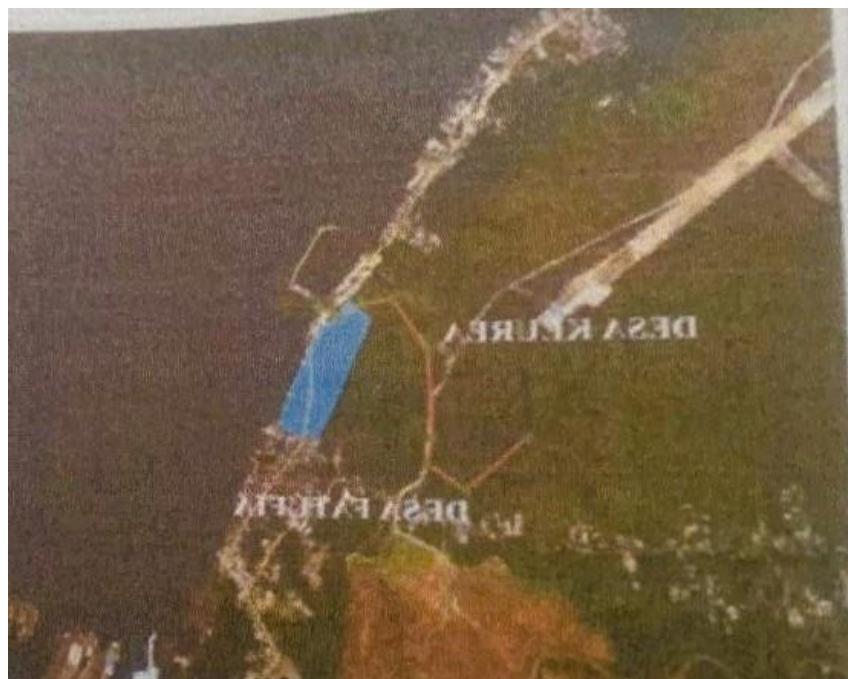
C. Kondisi Geografis Desa Keurea

1. Kewilayahan Desa Keurea

Mengenai kewilayahan saat ini Desa Keurea berdasarkan daftar koordinat Titik Kartometrik (TK) hasil penegasan batas Desa Keurea dan Desa Bahodopi terletak pada Koordinat $122^{\circ}7'36.45''$ BT dan $2^{\circ}47'17.76''$ LS, batas Desa Keurea dan Desa Labota terletak pada koordinat $122^{\circ}10'52.28''$ BT dan $2^{\circ}49'18.15''$ LS serta batas Desa Keurea dan Desa Fatufia terletak pada koordinat $122^{\circ}10'51.60''$ BT dan $2^{\circ}49'19.04''$ dengan luas keseluruhan wilayah yaitu 10.289 Ha yang terletak dibagian pesisir dan merupakan dataran rendah. Adapun batas-batas wilayah Desa Keureah adalah sebagai berikut :

- Utara : Laut Lepas
- Timur : Desa Fatufia dan Desa Labota
- Selatan : Desa Bahomakmur
- Barat : Desa Bahodopi

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Desa Keurea



Sumber : RPJMDes Tahun 2023

2. Karakteristik Desa Keurea

Desa keurea merupakan desa yang terletak pada wilayah yang mencakup pesisir dan daratan, Desa Keurea juga merupakan wilayah dataran rendah pada bagian permukiman Masyarakat, sedangkan pada bagian wilayah dataran tinggi merupakan bagian wilayah Desa Keurea yang terletak di pegunungan. Hal tersebut terlihat dari profesi-profesi Masyarakat yang sebagian masih berprofesi sebagai nelayan dan berprofesi dibidang perkebunan.

D. Kondisi Demografi Desa Keurea

Berdasarkan dinamika kependudukan di Desa Keurea sendiri besaran jumlah penduduknya yaitu sebanyak 4.330 jiwa yang terbagi dalam 5 Dusun, Dimana uraiannya sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Desa Keurea

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA		
				L	P	J
1	DUSUN I	55	172	253	218	471
2	DUSUN II	60	223	356	296	652
3	DUSUN III	58	227	331	257	588
4	DUSUN IV	53	473	977	483	1460
5	DUSUN V	38	396	676	483	1159
JUMLAH		261	1491	2.593	1.737	4.330

Sumber : Laporan Jumlah Penduduk Desa Keurea Bulan Desember Tahun 2024

Berdasarkan table diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa Desa Keurea memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.330 jiwa. Dimana jumlah tersebut terbagi

dalam 5 dusun yang ada, terlihat untuk jumlah rumah tangga disetiap dusunnya terbagi cukup merata dengan selisih yang tidak begitu jauh dimana total keseluruhan yaitu 261 rumah tangga, kemudian untuk jumlah KK terlihat dusun 4 yang memiliki jumlah terbanyak dengan 473 KK dan dusun 1 dengan jumlah KK terkecil yaitu 172 KK dari total keseluruhan 1420 KK, lalu perbandingan antara jumlah Laki-laki dan Perempuan dari table tersebut terlihat laki-laki mendominasi yaitu 2.593 jiwa dan perempuan dengan 1.737 jiwa.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dusun 4 yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Desa Keurea, hal tersebut disebabkan karena Pasar Desa Keurea berada di dusun 4 kemudian penduduk yang berada di dusun 4 tersebut pada awalnya merupakan orang-orang yang datang dari luar Desa Keurea untuk berdagang dan bekerja di pasar tersebut. Dengan telah berdomisili di Desa Keurea, orang-orang tersebut mengajak keluarga ataupun kerabat mereka untuk datang merantau dan bekerja di pasar Desa Keurea maupun melamar pekerjaan di PT. IMIP, maka dari itu dusun 4 lebih banyak dihuni oleh orang-orang yang berasal dari luar Desa Keurea dibandingkan dengan orang asli Desa Keurea. Berbeda halnya dengan dusun 1, 2 dan 3 dengan jumlah penduduk terendah di Desa Keurea, dusun ini lebih banyak dihuni oleh orang-orang asli Desa Keurea terutama dusun 1, sehingga wajar saja jika jumlah penduduknya terpaut lebih sedikit dibandingkan dusun 4 dan 5 Desa Keurea.

Tabel 2. 2 Data Jumlah penduduk berdasarkan Kelompok Usia

NO	KELOMPOK USIA	LAKI-LAKI (Orang)	PEREMPUAN (Orang)	JUMLAH (Orang)
1.	Usia 0 – 9 Tahun	327	189	516
2.	Usia 10 – 14 Tahun	215	150	365
3.	Usia 15 – 19 Tahun	240	165	405

4.	Usia 20 – 29 Tahun	330	235	565
5.	Usia 30 – 39 Tahun	610	430	1.040
6.	Usia 40 – 54 Tahun	565	403	968
7.	Usia 55 – 64 Tahun	215	130	345
8.	Usia 65 – 74 Tahun	70	33	103
9.	Usia > 75 Tahun	15	8	23
JUMLAH		2.587	1.743	4.330

Sumber : Laporan Jumlah Penduduk Desa Keurea Bulan Desember Tahun 2024

Dari table diatas Jika dilihat jumlah antara laki-laki dan perempuan dari seluruh kategori usia yang ada di Desa Keurea berjumlah 4.330 orang. Dimana jumlah laki-laki dari keseluruhan kategori usia yaitu 2.587 orang dengan jumlah terbanyak pada kategori usia 30 - 39 tahun sebanyak 610 orang, kemudian pada jumlah perempuan dari keseluruhan kategori usia berjumlah 1.743 orang dengan jumlah terbanyak pada kategori usia 30 - 39 tahun sebanyak 430 orang.

Berdasarkan tabel tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penduduk Desa Keurea dengan beberapa kategori usia yang ada pada tabel diatas terlihat di-dominasi oleh kategori usia produktif yang siap untuk bekerja dibandingkan dengan usia belum produktif dan sudah tidak produktif. Dengan didukung tersedianya lapangan pekerjaan sebagai buruh pabrik, maka penduduk Desa Keurea pada kategori usia produktif mayoritas berprofesi sebagai buruh pabrik.

Tabel 2. 3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI (Orang)	PEREMPUAN (Orang)	JUMLAH (Orang)
1.	SD/Sederajat	335	288	623
2.	SMP/Sederajat	263	328	591
3.	SMA/Sederajat	497	253	750

4.	Diploma	93	127	220
5.	S1	253	178	431
6.	S2	1	0	1
JUMLAH		1.442	1.174	2.616

Sumber : Laporan Jumlah Penduduk Desa Keurea Bulan Desember Tahun 2024

Berdasarkan table jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan diatas, dapat kita lihat bahwa dari semua jenjang Pendidikan yang terdapat pada table diatas, ada sebanyak 1.442 orang laki-laki dan 1.174 orang perempuan, terbanyak itu pada jenjang SMA/sederajat dengan total 750 orang laki-laki dan perempuan. Jika dilihat secara total keseluruhan jenjang pendidikan laki-laki dan Perempuan di Desa Keurea yaitu sebanyak 2.616 orang.

Dari data tersebut tentunya jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Keurea dapat dikatakan cukup baik, karena dari jenjang pendidikan tingkat dasar telah adanya dorongan untuk bersekolah, serta jumlah penduduk yang telah merasakan jenjang pendidikan dari tingkat SD - Sarjana sudah cukup banyak. Masyarakat Desa Keurea itu sendiri berdasarkan tabel diatas paling banyak menempuh pendidikan sampai pada jenjang SMA/Sederajat dengan jumlah 750 orang. Tentunya hal ini menunjukan bahwa Masyarakat Desa Keurea menganggap bahwa Pendidikan merupakan hal yang penting.

Tabel 2. 4 Jumlah penduduk berdasarkan Agama

NO	AGAMA	LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	JUMLAH (orang)
1.	Islam	2.385	1.603	3.988
2.	Kristen	184	116	300
3.	Katholik	23	14	37

4.	Hindu	3	1	4
5.	Budha	1	0	1
JUMLAH		2.596	1.732	4.330

Sumber : Laporan Jumlah Penduduk Desa Keurea Bulan Desember Tahun 2024

Berdasarkan table jumlah penduduk berdasarkan agama diatas kita dapat melihat bahwa penduduk di Desa Keurea menganut beberapa agama, diantaranya agama Islam dengan jumlah 3.988 orang, agama Kristen dengan jumlah 300 orang, agama Katholik dengan jumlah 37 orang, agama Hindu dengan jumlah 4 orang dan agama Budha dengan jumlah 1 orang. Berdasarkan jumlah penganut yang ada, agama yang yang memiliki penganut terbanyak di Desa Keurea yaitu agama Islam dengan jumlah 3.988 orang dan agama Budha dengan penganut terendah sebanyak 1 orang.

E. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Keurea

1. Kondisi Sosial Desa Keurea

Kondisi sosial Desa Keurea meliputi beberapa aspek diantaranya yaitu aspek Kesehatan, aspek Pendidikan dan aspek Keagamaan. Dibawah ini merupakan penjabaran dari beberapa aspek sosial tersebut, sebagai berikut :

a. Kesehatan

Pada aspek kesehatan Desa Keurea memiliki beberapa prasarana untuk menopang kualitas kesehatan Masyarakat Desa Keurea.

Tabel 2. 5 Data Prasarana Kesehatan Desa Keurea

NO	NAMA	JUMLAH	ALAMAT
1.	Puskesmas	-	-
2.	Poskesdes	1	Dusun 2

3.	Posyandu	1	Dusun 1
4.	Apotek	10	Dusun 1, 2, 3, 4 dan 5

Sumber : Laporan Jumlah Penduduk Desa Keurea Bulan Desember Tahun 2024

Berdasarkan table diatas dapat dikatakan bahwa Desa Keurea begitu memperhatikan aspek kesehatan dengan tersediaan prasarana kesehatan yang mendasar seperti poskesdes, posyandu dan apotek. Dengan lokasi Puskesmas Kecamatan juga berlokasi di Desa Keurea sehingga sehingga dapat dikatakan masyarakat Desa Keurea cukup mudah untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada. Adanya prasarana-prasarana tersebut, dengan begitu kegiatan-kegiatan seperti imunisasi anak dan penyuluhan-penyuluhan kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik karena telah tersedianya prasarana di Desa Keurea, tentu hal ini juga merupakan bagian dari penunjang kualitas kesehatan Masyarakat Desa Keurea.

b. Pendidikan

Mengenai aspek Pendidikan Desa Keurea tentunya melakukan Upaya untuk bagaimana tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat, peningkatan yang dilakukan diantaranya melalui penyediaan fasilitasi sarana belajar dan pengembangan kelompok belajar informal. Dengan adanya peningkatan yang dilakukan melalui beberapa upaya tersebut diharapakan tingkat pendidikan yang ada dimasyarakat terus meningkat. Desa Keurea sendiri sejauh ini telah memiliki beberapa sekolah formal dan sekolah non formal PAUD, diantaranya sebagai berikut :

- Taman Kanak-Kanak (TK)
 - TK Ibnu Qayum (Keurea)
 - TK Hasan Al-Basri (Keurea)
 - TK Tunas Bangsa (Keurea)
 - TK Jasuli Kitta (Keurea)

- Sekolah Dasar (SD)
 - SD Negeri Keurea
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - SMP Negeri 1 Bahodopi
- Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - SMA Negeri Bahodopi

Berdasarkan pemaparan fasilitas pendidikan diatas, dapat dikatakan bahwa Desa Keurea telah memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai dengan tersedianya beberapa fasilitas pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMA/sederajat. Walaupun untuk fasilitasi pendidikan sekolah dasar (SD) belum memadai karena hanya memiliki satu fasilitas pendidikan Sekolah Dasar. Berdasarkan pengamatan peneliti, untuk anak-anak sekolah dasar khususnya kelas 1 sampai dengan 3 SD jadwal masuk sekolahnya dibuat bergantian, kelas 1A sampai dengan kelas 3A dijadwalkan masuk pagi dan kelas 1B sampai dengan kelas 3B dijadwalkan masuk siang. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa fasilitas pendidikan pada tingkat SD belum cukup memadai dan perlu dilakukan penambahan ruangan, agar proses pelaksanaan belajar mengajar dapat terlaksana dengan optimal.

c. Keagamaan

Dalam aspek keagamaan di Desa Keurea sendiri untuk menunjang terlaksananya kegiatan peribadatan, terdapat beberapa tempat beribadah dari beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Desa Keurea, diantaranya sebagai berikut :

- Rumah Ibadah Agama Islam
 - Masjid Jami Nurul Iman

- Masjid Al-Atas
- Masjid Ibnu Maryam
- Masjid Babun Najwia
- Masjid Nima Al Hasyim
- Rumah Ibadah Agama Kristen
 - Gereja Pamona
 - Gereja Katholik Stasi Santo Yosef

Berdasarkan pemaparan rumah ibadah diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk masyarakat yang beragama Islam di Desa Keurea terdapat 5 Masjid yang dapat digunakan sebagai tempat beribadah masyarakat yang beragama Islam, kemudian juga terdapat 2 Gereja yang dapat digunakan masyarakat yang beragama kristen dan katholik untuk beribadah. Untuk masyarakat yang beragama Hindu dan Budha di Desa Keurea, belum terdapat rumah ibadah yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah, sehingga bagi masyarakat yang beragama Hindu dan Budha harus menuju desa tetangga yang telah rumah ibadah Agama Hindu dan Budha agar dapat melaksanakan ibadahnya.

2. Mata Pencaharian Penduduk

Desa Keurea merupakan Desa yang masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai Karyawan Perusahaan Swasta, dibawah ini adalah mata pencarian masyarakat yang ada di Desa Keurea, sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Data Mata Pencaharian Penduduk

NO	MATA PENCAHARIAN PENDUDUK	SATUAN	JUMLAH
1.	Karyawan Perusahaan Swasta	Orang	1.367

2.	PNS	Orang	113
3.	TNI/POLRI	Orang	3
4.	Petani	Orang	131
5.	Nelayan	Orang	105
6.	Pengrajin Industri RT	Orang	117
7.	Wiraswasta	Orang	823
JUMLAH			2.659

Sumber : Laporan Jumlah Penduduk Desa Keurea Bulan Desember Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas Masyarakat Desa Keurea itu sendiri memiliki beberapa sumber mata pencaraian, seperti Karyawan Perusahaan Swasta dengan jumlah 1.367 orang, PNS dengan jumlah 113 orang, TNI/POLRI dengan jumlah 3 orang, Petani dengan jumlah 131 orang, Nelayan dengan jumlah 105 orang, Pengrajin Industri RT dengan jumlah 117 orang dan Wiraswasta sebanyak 823 orang.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa mata pencarian penduduk Desa Keurea lebih banyak berprofesi sebagai Karyawan Perusahaan Swasta dengan total 1.367 orang serta jumlah mata pencaharian terendah yaitu TNI/POLRI sebanyak 3 orang. Besarnya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai karyawan perusahaan swasta, tentu tidak terlepas karena tersedianya lapangan pekerjaan yang ada dari hadirnya perusahaan industri di Kecamatan Bahodopi, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Keurea yang masuk dalam usia produktif lebih memilih menjadi karyawan perusahaan dengan gaji yang

menurut mereka cukup besar dibandingkan dengan menggeluti profesi/mata pencaharian lain.

F. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa Keurea

Desa Keurea secara wilayah terbagi menjadi 5 Dusun dan dari setiap dusunya dipimpin oleh masing-masing Kepala Dusun, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Data Pembagian Wilayah Desa Keurea

NO	Dusun	Nama Kepala Dusun
1.	Dusun I	Bpk. Amir M
2.	Dusun II	Bpk. Asbud
3.	Dusun III	Bpk. Mukhlis
4.	Dusun IV	Bpk. Arifin
5.	Dusun V	Bpk. Najmin

Sumber : RPJMDes Tahun 2023

Berdarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Desa Keurea memiliki 5 Dusun dimana setiap dusun dipimpin oleh para kepala dusun. Kepala Dusun sendiri memiliki fungsi dalam tugas kewilayahan dan membantu lurah dalam melaksanakan yang menjadi tugas diwilayah, kepala Dusun sendiri memiliki fungsi yaitu memberikan pembinaan mengenai keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan bagaimana berkaitan mengenai penataan dan pengelolaan wilayah.

2. Struktur Pemerintahan Desa Keurea

Desa Keurea merupakan Desa yang memiliki struktur Pemerintahan didalamnya dimana terdapat Kepala Desa, Sekretaris Desa, beberapa Kaur, beberapa Kasi,

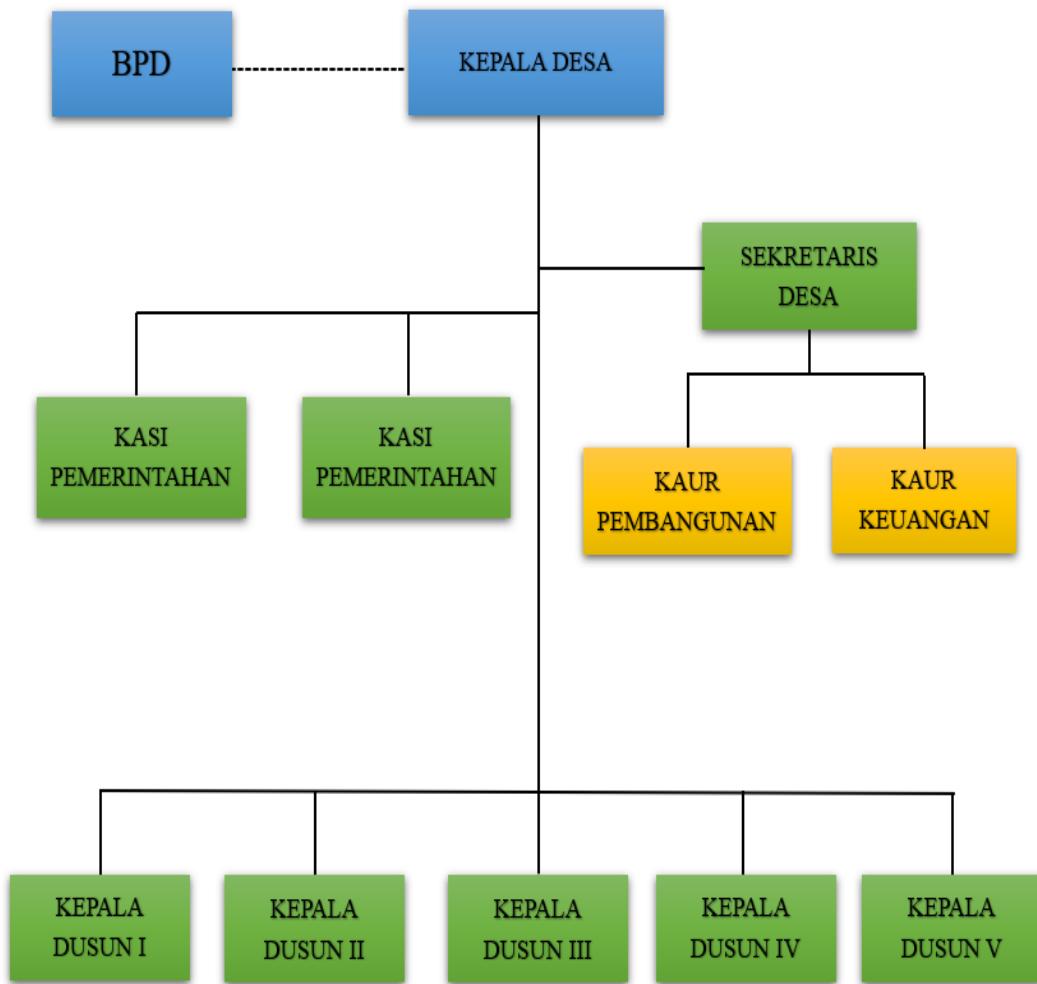
beberapa Kepala Dusun dan para Staf, yang dimana memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Tabel 2. 8 Susunan Pemerintahan Desa Keurea

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Husni Abdul Wahab S.Sos	Kepala Desa	Dusun I
2.	Suparno S.H	Sekretaris Desa	Dusun II
3.	Ambotang S. H	Kaur Pembangunan	Dusun III
4.	Chalji Rahmat	Kaur Keuangan	Dusun I
5.	Zaenal Abidin Mashur S.Si	Kasi Pemerintahan	Dusun I
6.	Suwarni S.Pd	Kasi Pelayanan	Dusun II
7.	Amir M	Kepala Dusun I	Dusun I
8.	Asbud	Kepala Dusun II	Dusun II
9.	Mukhlis	Kepala Dusun III	Dusun III
10.	Arifin	Kepala Dusun IV	Dusun IV
11.	Najmin	Kepala Dusun V	Dusun V
12.	Nining Wulandari	Staf	Dusun V
13.	Irfan	Staf	Dusun II
14.	Nursyamsi	Staf	Dusun II

Adapun struktur Organisasi Pemerintahan Desa Keurea digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Keurea



3. APBDes Desa Keurea

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang dikelola

oleh Pemerintah Desa Keurea dimana rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Data APBDes Desa Keurea Tahun 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
----------	--------	---------------	------------

	PENDAPATAN		
	Pendapatan Transfer	2.231.993.372,00	
	Pendapatan Lain-lain	1.170.169,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		2.233.163.541,00
	BELANJA		
	Belanja Pegawai	463.197.600,00	
	Belanja Barang dan Jasa	703.405.173,82	
	Belanja Modal	664.780.000,00	
	Belanja Tidak Terduga	408.026.092,00	
	JUMLAH BELANJA		2.239.408.865,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(6.245.324,82)
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	6.245.324,82	
	SILPA Tahun Sebelumnya	6.245.324,82	
	PEMBIAYAAN NETTC		6.245.324,82
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumber : APBDes Desa Keurea Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pendapatan yang diperoleh Desa Keurea bersumber dari pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Dimana pendapatan transfer termaksut didalamnya yaitu Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta Alokasi Dana Desa sedangkan untuk pendapatan lain-lain yaitu Bunga Bank, dengan jumlah keseluruhan Pendapatan sebesar Rp 2.233.163.541 dan jumlah keseluruhan Belanja sebesar Rp 2.239.408.865, dimana dari angka tersebut dapat dilihat bahwa jumlah belanja lebih besar dari jumlah pendapatan dengan begitu terjadi defisit sebesar Rp 6.245.324 yang kemudian

defisit tersebut ditutupi oleh Pembiayaan dari SILPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp 6.245.324.

Berdasarkan tabel dan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari segi pendapatan Desa Keurea memperoleh pendapatan terbesar yang bersumber dari pendapatan transfer. Kemudian pada bagian Belanja, pembelanjaan terbesar Desa Keurea pada tahun 2024 yaitu pada belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa menjadi pembelanjaan terbesar Desa Keurea karena hal tersebut mencakup bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembinaan Kemasyarakatan serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat sebagai BUMDes merupakan lembaga tingkat desa yang tentunya diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, penyediaan layanan sosial serta menjadi sumber pendapatan desa. Desa Keure juga merupakan desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa dimana BUMDes ini berdiri pada tahun 2019 dengan nama ANUNTO (milik kita), BUMDes ANUNTO sejak pertama berdiri hingga sekarang diketuai oleh bapak Hariyadi sebagai lembaga tentunya BUMDes ANUNTO juga memiliki susunan kepengurusan, dimana susunan kepengurusan tersebut adalah sebagai berikut :

Ketua BUMDes : HARIADI

Sekretaris : ABDUL RAHIM

Bendahara : RITNI SARI

Kepala Unit : TEGAR WIJAYANTO

Dalam perjalananannya BUMDes ANUNTO telah memiliki beberapa unit usaha yang dijalankan sebagai sumber pendapatannya, dimana unit usaha BUMDes ANUNTO diantaranya sebagai berikut :

- Pengelolaan Sampah
- Depot Air Gelon
- Spot Pemancingan

Gambar 2. 3 Kendaraan Pengangkut Sampah BUMDes Anunto



Sumber : Foto Dokumentasi Lapangan

Untuk unit pengelolaan sampah, unit usaha ini berdiri pada tahun 2020 awal dimana unit ini merupakan agenda utama dari diberdirikannya Badan Usaha Milik Desa di Desa Keurea, untuk pendapatan pertahunnya unit usaha ini memiliki pendapatan sebesar Rp 245.435.000. Sampai dengan saat ini unit usaha pengelolaan sampah telah cukup berkembang, dimana yang awalnya hanya memiliki 1 mobil dum truk sebagai mobil operasional sekarang telah bertambah menjadi 2 mobil dum truk dan 3 motor viar (3 roda) sebagai kendaraan operasional pengangkut sampah. Dimana kendaraan tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah daerah Kabupaten Morowali.

Kemudian untuk unit usaha Depot Air Gelon, unit usaha ini berdiri pada bulan Juli tahun 2024, untuk pendapatan perbulan unit usaha ini memiliki pendapatan sebesar Rp 4.500.000, kemudian mengenai kendaraan operasional dari unit usaha ini, pihak BUMDes untuk sementara masih melakukan penyewaan mobil mega carry milik masyarakat dengan harga sewa sebesar Rp 1.200.000.

Lalu unit usaha yang terakhir yaitu Spot Pemancingan, diaman unit usaha ini berdiri pada bulan Januari 2025 dan rencana akan mulai dijalankan pada awal bulan februari tahun ini. Untuk pendapatannya sendiri belum dapat diperkirakan karena unit usaha ini baru akan dijalankan pada awal bulan februari 2025 ini.

BAB III

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KEUREA

Pada bab ini, peneliti pertama-tama mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai proses kolaborasi dalam program Pengelolaan Sampah yang dimana proses tersebut meliputi: (a) dialog tatap muka (*face-to-face*); (b) membangun kepercayaan dan komitmen (*trust and commitment to process*); (c) pemahaman bersama (*shared understanding*); dan (d) hasil sementara (*intermediate outcome*). Kemudian hal tersebut dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai peran setiap aktor dalam tahapan kolaborasi pengelolaan sampah, dimana peran setiap aktor tersebut meliputi pengklasifikasian stakeholder yakni: (a) stakeholder primer (*primary stakeholders*); (b) stakeholder sekunder (*secondary stakeholders*); dan (c) stakeholder kunci (*key stakeholders*). Lalu kemudian diakhiri dengan penjelasan mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung pada proses kolaborasi dalam program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea. Dalam penyusunan bab ini, peneliti menyajikan temuan penelitian pada sub-bab tahapan proses kolaborasi dan pemetaan stakeholder. Kemudian dengan analisis temuan penelitian pada sub-bab proses kolaborasi dan faktor penghambat serta faktor pendukung pada program Pengelolaan Sampah. Berikut pembahasan lebih spesifik tentang proses kolaborasi antar stakeholder pada program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea.

A. Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Desa Keurea

Proses *collaborative governance* senantiasa digambarkan sebagai tahap pengembangan kesepakatan yang menjelaskan bagaimana fase-fase program kolaborasi dilaksanakan mulai dari fase pra negosiasi, fase negosiasi, sampai pada implementasi program. Sehingga keberhasilan kolaborasi tergantung pada bagaimana siklus kolaborasi itu berputar mulai dari komunikasi dengan dialog tatap muka, membangun kepercayaan

dan komitmen, berbagi pemahaman sampai pada hasil yang ingin dicapai (Islamy, 2018:52). Siklus ini terus berputar dan berulang selama proses kolaborasi berlangsung.

Proses kolaborasi merupakan suatu proses dimana didalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama. Ansell & Gash (2008) dalam (Islamy, 2018) mengidentifikasi proses kolaboratif sebagai siklus yang meliputi: dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust - building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

Face to face dialogue atau pertemuan tatap muka merupakan pertemuan antara stakeholder atau pemangku kepentingan yang menjadi aktor dalam proses kolaborasi, dimana pertemuan itu dilakukan dalam tempat dan waktu yang sama sehingga terjadi dialog secara langsung dan interaktif antara stakeholder tersebut untuk mencapai consensus atau kesepakatan bersama. Dalam upaya mencapai kesepakatan bersama sebagai bentuk untuk penyelesaian permasalahan sampah di Desa Keurea telah melibatkan beberapa stakeholder. Pertemuan tatap muka ini awalnya dilakukan di-Aula kantor Desa Keure untuk membahas hal-hal mengenai permasalahan sampah di Kecamatan Bahodopi, hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Keurea:

“Pada awalnya memang sudah banyak itu laporan-laporan dari Masyarakat tentang bau busuk sampah yang tertumpuk di pinggir-pinggir jalan, makin kesini makin banyak tumpukan-tumpukan sampah yang bersebaran dimana-mana dan bahkan ada itu tidak jauh dari kantor desa tumpukan sampah dekat jembatan. Dari laporan-laporan itu dan ketika kami turun langsung, kami sadar bahwa Desa Keurea telah darurat sampah, maka kami lakukan konsultasi ke DLH untuk pembuatan konsep pengelolaan sampah. Setelah itu kami lakukan pertemuan di Aula Kantor Desa Keurea dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, PKK, kepala dusun, BPD, pihak kecamatan,bahkan perwakilan pihak pt.imip. dalam pertemuan itu kami membahas mengenai upaya penanganan dari kondisi darurat sampah yang sudah terjadi” (Wawancara, 14 Oktober 2024, pukul 15.40 WITA).

Pertemuan tatap muka dalam hal ini, Pemerintah Desa Keurea awalnya mengadakan rapat formal dengan menghadirkan beberapa lembaga yang ada di Desa Keurea seperti BUMDes, PKK dan Karangtaruna termasuk juga dengan lembaga lain seperti pihak Kecamatan dan perwakilan PT. IMIP dengan tujuan menindak lanjuti konsultasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali. Pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan ini termasuk juga penunjukan BUMDes sebagai pelaksana program Pengelolaan Sampah ini.

Berdasarkan hasil observasi dari peneliti, peneliti menemukan bahwa memang benar banyak tumpukan-tumpukan sampah di pinggir jalan dan juga di lahan-lahan kosong masyarakat, dimana tumpukan-tumpukan sampah tersebut telah menyebabkan pencemaran udara dengan bau busuk dari sampah tersebut sehingga masyarakat menjadi resah dan terganggu.

Lebih jauh, proses kolaborasi tentu tidak hanya sekedar berdialog tatap muka saja, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana membangun kepercayaan dan komitmen diantara stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi. Para stakeholder harus menunjukkan niat baik pada sikap keterbukaan, berbagi pengetahuan dan menindak lanjuti suatu program yang dilaksanakan demi membangun kepercayaan dan komitmen.

Seiring dengan berjalannya proses pengelolaan sampah di Desa Keurea yang dimana BUMDes sebagai eksekutor, kepercayaan dan komitmen para stakeholder dapat dikatakn cukup baik. Dimana kepercayaan dan komitmen ini ditandai dengan keterbukaan setiap stakeholder dalam mendukung program pengelolaan sampah.

“Untuk kepercayaan dan komitmen dapat dikatakan cukup baik, karena pada saat kami mengadakan rapat di aula kantor Desa Keurea untuk membahas tentang iuran sampah, rumah tangga, rumah makan/warung dan kios/toko yang nominalnya untuk rumah-rumah itu sebesar Rp 30.000, untuk pedagang/warung Rp 50.000 dan untuk kios/toko Rp 60.000-100.000 tergantung banyaknya sampah yang dihasilkan. Nominal tersebut disambut baik dan disepakati oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi sebenarnya Masyarakat itu paham kalau sampah ini suda mulai jadi masalah sehingga nominal iuran seperti itu tidak jadi masalah asalkan

sampah-sampah mereka selalu diambil dengan jadwal yang telah ditentukan. Bahkan beberapa Masyarakat dan toko-toko itu katakana bayar lebhpun tidak masalah asalkan sampahnya tidak menumpuk dan jadi bau” (Kepala Desa Keurea, 14 Oktober 2024, pukul 16.15 WITA).

Dari hasil pengamatan peneliti, peneliti menemukan bahwa dalam proses membangun kepercayaan dan komitmen, terdapat beberapa masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam upaya membangun kepercayaan dan komitmen. Dimana beberapa masyarakat ada yang enggan membayar iuran sampah dengan alasan karena sampahnya tidak diangkut, sedangkan berdasarkan pendataan BUMDes, bahwa sampah masyarakat tersebut telah diangkut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Proses membangun kepercayaan dan komitmen ini tentunya telah dilakukan sejak awal dialog tatap muka secara langsung maupun tidak langsung pada pembahasan upaya penanganan sampah di Desa Keurea. Upaya tersebut tentu sangatlah penting dijalankan agar tujuan dari program pengelolaan sampah dapat tercapai dengan baik, karena membangun kepercayaan dan komitmen tentu memerlukan waktu yang tidak sedikit dan perlu dijalankan secara terus menerus. Terbangunnya kepercayaan dan komitmen diantara stakeholder dalam program Pengelolaan Sampah tentunya tidak lepas dari keterbukaan setiap stakeholder untuk saling bekerja sama.

Selain itu, dalam membangun kepercayaan dan komitmen pada setiap stakeholder juga ditemukan pertukaran pengetahuan, dimana manifestasi dari pertukaran pengetahuan tersebut ditunjukkan melalui sosialisasi ataupun pelatihan. Lebih jauh, pertukaran pengetahuan melalui sosialisasi ataupun pelatihan juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Keurea:

“Untuk mendukung program Pengelolaan Sampah dalam hal mengatasi kondisi darurat sampah di Desa Keurea, yaa tentu semacam sosialisasi dan pelatihan itu sudah dilakukan. Awalnya teman-teman dari komunitas dan pecinta lingkungan hidup mengusulkan kegiatan aksi bersih sampah di hari minggu, setelah kegiatan itu mereka mengusulkan lagi mengenai sosialisasi tentang sampah dengan

mengundang pihak Dinas Lingkungan Hidup” (Wawancara, 15 Oktober 2024, pukul 20.00 WITA).

Lebih lanjut pertukaran pengetahuan melalui sosialisasi dan pelatihan juga disampaikan oleh perwakilan divisi persampahan PT. IMIP:

“Untuk pelatihannya telah kami lakukan mas, jadi awalnya ketika pihak pemerintah Desa Keurea melakukan sosialisasi tentang sampah, sosialisasi tersebut dibarengi dengan pembagian drum-drum sampah dari PT. IMIP yang ditempatkan disetiap rumah-rumah masyarakat termasuk juga karung dibagikan untuk dijadikan tempat sampah. Yaa walaupun belum dapat kami bagikan keseluruhan rumah-rumah di 5 dusun, tetapi itu langkah awal kami lah mas. Nah untuk pelatihannya, kami coba memulai dari pelatihan pemanfaatan sampah plastik dimana kami coba lakukan pelatihan kepada ibu-ibu PKK mulai dari membuat bunga dari sampah plastik, pot bunga dari sampah plastik dan lain-lain” (Wawancara, 21 Oktober 2024, pukul 16.20 WITA).

Terbangunnya Kerjasama kolaboratif dalam rangka meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan dan sosialisasi sehingga pada saat yang sama akan menumbuhkan rasa saling percaya dan komitmen. Disamping itu, dalam membangun kepercayaan dan komitmen tidak hanya berhenti pada pendampingan maupun pelatihan, tetapi juga dilakukan dalam bentuk rencana tindak lanjut program Pengelolaan Sampah yang diwujudkan dalam rapat evaluasi program Pengelolaan Sampah.

Berbagi pemahaman atau kesepahaman bersama perlu dilakukan pada setiap hal, baik itu pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun pada saat evaluasi kegiatan. Kesepahaman bersama antar stakeholder selaras dengan kepercayaan dan komitmen, pada saat itu stakeholder mempunyai kepercayaan dan komitmen, maka dengan mudah stakeholder yang berkolaborasi akan mempunyai kesepahaman bersama. Disamping itu, kesepahaman bersama juga ditunjukan dengan bagaimana antar stakeholder menjalin kerjasama pada kapasitas masing-masing yang saling berkaitan.

“Kalau mengenai kesepahaman bersama, itu terlihat dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat pada saat pertemuan-pertemuan sebelumnya yang membahas tentang tugas masing-masing dalam program Pengelolaan Sampah ini, misalnya seperti BUMDes yang bertugas melakukan pengambilan sampah dimasyarakat, kemudian beberapa ibu-ibu PKK yang ditunjuk sebagai penagih iuran sampah dimasyarakat serta Pemerintah Desa yang bertugas membangun relasi dengan

pihak perusahaan dan PEMDA untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang kami butuhkan program Pengelolaan Sampah. jadi hasil dari kesepakatan itu yang menjadi acuan kami dalam menjalankan program Pengelolaan Sampah ini.” (Ketua BUMDes ANUNTO, 16 September 2024, pukul 15.15 WITA).

Pada dasarnya, suatu kolaborasi dalam pelaksanaan program tidak dapat dihindarkan dari adanya ketidaksepahaman yang dapat memunculkan konflik diantara stakeholder. Diawal, berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan menunjukan bahwa adanya kesepahaman bersama antar stakeholder dalam program pengelolaan sampah, hal ini tidak terlepas dari adanya dialog secara langsung maupun tidak langsung yang diarahkan pada pendefinisian masalah dan penentuan tujuan bersama dalam penanganan permasalahan sampah di Desa Keurea. Namun dalam perjalannya pelaksanaan program ini, pertemuan-pertemuan untuk membahas progres program ini baik itu permasalahan yang dihadapi tidak lagi dilakukan dengan rutin atau melibatkan masyarakat secara umu. Tentu dialog-dialog yang dilakukan secara intensif menjadi wadah untuk menjalin kesepahaman bersama diantara stakeholder, jika tidak lagi dilakukan hal tersebut tentunya dapat menyebabkan ketidak sepahaman antara stakeholder yang terlibat dalam kerjasama kolaborasi ini.

Setelah tahapan dialog tatap muka, membangun kepercayaan dan komitmen serta pemahaman bersama pada proses kolaborasi, maka tahap terakhir pada proses kolaborasi antar stakeholder pada program Pengelolaan Sampah adalah *intermediate outcomes*. Ansell and Gash (2008) dalam (Islamy, 2018) menerjemahkan bahwa *intermediate outcomes* atau hasil sementara ini terjadi selama proses kolaborasi berlangsung, sehingga ada kata “sementara” didalamnya. Hasil sementara tentunya memberikan umpan balik dalam proses kolaborasi, mendorong siklus dan membangun kepercayaan serta komitmen.

Hasil sementara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil terlihat dan perubahan praktik ketika proses pengelolaan sampah yang dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan sampah di Desa Keurea. Program Pengelolaan Sampah dilakukan melalui dua tahap diantaranya jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendek dilakukan dengan menargetkan pengalokasian lahan untuk digunakan sebagai Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), sedangkan jangka panjang ditargetkan untuk menghadirkan lahan yang dapat digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengadaan kontener-kontener sampah disetiap dusun sehingga dapat mengoptimalkan program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea. Sejauh penelusuran peneliti pada dokumen program Pengelolaan Sampah dalam jangka pendek telah terlaksana dengan baik, sementara jangka Panjang masih dalam proses pelaksanaan.

“Pada saat itu, kita memang sulit dapat lahan untuk TPS, memang desa punya lahan yang luasnya cukup untuk dijadikan TPS, tapikan posisinya ditengah kampung, terus lahan itu persiapan untuk lapangan anak-anak karangtaruna, pasti tidak mau mereka kalau dijadikan TPS lahan itu. Nah kita carilah lahan yang bisa dipakai untuk dijadikan TPS, ketemu kita lahan di lende-lende (bukit) kebetulan lahan itu juga punya orang kampung, setelah kita bicara dengan pemilik lahan akhirnya dipakailah sama BUMDes sebagai TPS sementara mereka” (Ketua BUMDes ANUNTO, Bapak Hriadi, 16 September 2024, pukul 14.44 WITA).

Lebih lanjut proses pengadaan TPS sementara juga disampaikan oleh Bapak Sunardin selaku masyarakat pemilik lahan:

“Memang sebelum ketua BUMDes ketemu dengan saya, pernah waktu di acara duka pak Kades pernah bahas mengenai lahan yang di lende-lende, katanya mau disewa sama BUMDes untuk dijadikan TPS sementara sembari menunggu TPS tetap yang masih sementara diusahakan, saya jawab kalau untuk sementara tidak masalah hanya saja saya minta nanti setelah slesai dipakai tolong dibersihkan jangan sampai ada sisa-sisa sampah berserakan. Pada saat ketua BUMDes ketemu dengan saya pertama mereka minta dibeli, hanya saja saya belum mau kalau dibeli, terus mereka tawarkan untuk disewa dan mereka minta harga sewanya kalau bisa pengertiannya. Berhubung lahan itu belum ada rencana untuk saya pakai/kelola jadi saya persilahkan mereka buat pakai sementara tanpa disewa soalnya mereka bilang hanya mau pakai paling lambat satu tahun, hanya saja tadi saya minta setelah pakai tolong dibersihkan kembali” (Wawancara, 20 September 2024, pukul 15.20 WITA).

Berkaitan dengan hasil jangka pendek, diawal program Pengelolaan Sampah tentu telah memperlihatkan hasil yang mencapai target perencanaan sebelumnya. Hal tersebut ditunjukan pada pengalokasian lahan yang digunakan sebagai tempat pembuangan sementara, dimana lahan tersebut berukuran 5.000 m² dan lahan tersebut berupa lahan pinjaman kepada Masyarakat.

Bertolak dari hasil sementara program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea pada jangka pendek, tentunya Program Pengelolaan Sampah membawa dampak positif yang memicu keterlibatan setiap stakeholder dalam melaksanakan program tersebut. Dalam upaya penanganan sampah sendiri, tentu dapat dilihat antusias dan keterlibatan setiap stakeholder khususnya masyarakat Desa Keurea dalam pelaksanaan dalam Program Pengelolaan Sampah. Mengenai hasil sementara pada program jangka pendek, dari hasil wawancara peneliti untuk program jangka panjang selain mengupayakan pengadaan TPA dan kontainer sampah, program Pengelolaan Sampah ini juga diupayakan agar dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat termaksut penyediaan lapangan pekerjaan.

Peneliti memahami bahwasanya program Pengelolaan Sampah ini tentu memberikan dampak positif dalam upaya penanganan permasalahan sampah di Desa Keurea. Hal ini dapat dilihat dari sampah-sampah yang dulunya berserakan dan menimbulkan bau busuk sudah mulai berkurang setelah hadirnya program Pengelolaan Sampah ini, termaksut juga dengan masyarakat yang sering membuang sampah secara sembarangan mulai berkurang karena melihat telah ada aktivitas pengangkutan sampah di rumah-rumah masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes. Program Pengelolaan Sampah ini, selain mengatasi permasalahan sampah yang ada, disisi lain juga membuka lapangan pekerjaan dan nantinya dapat memberikan peluang peningkatan ekonomi melalui pengelolaan sampah menjadi barang bernilai tambah.

Seiring berjalannya program Pengelolaan Sampah ini, peneliti menemukan hal yang menarik. Hal menarik yang dimaksut peneliti yaitu kendala atau permasalahan yang dihadapi sehingga menyebabkan keberlangsungan program ini, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati diawal tidak dapat terealisasi. Sejak berdirinya BUMDes Anunto pada tahun 2019 hingga saat ini, program Pengelolaan Sampah pertama kali dijalankan pada awal tahun 2020 termasuk dengan proses kolaborasi yang dilakukan. Pada awal pelaksanaannya tentu berjalan dengan lancar seperti yang telah peneliti sampaikan sebelumnya. Tetapi pada akhir tahun 2020 BUMDes Anunto selaku eksekutor dari program Pengelolaan Sampah mengalami pembubaran kepengurusan. Dimana pada saat itu pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit I, Kepala Unit II dan Kepala Unit III terjadi ketidak sepahaman sehingga menyebabkan pengunduran diri dari setiap pengurus yang diamana hanya menyisahkan Ketua saja, hal ini dijelaskan oleh Ketua BUMDes:

“Yaa dulu ketika awal dijalankan Badan Usaha Milik Desa ini, setiap unit-unit usaha yang ada itu memiliki kepala unitnya masing-masing, termasuk pada unit persampahan juga, bahkan dipersampahan ini sudah dibagi orang-orangnya, misalnya yang bertugas pungut iuran siapa, yang ambil sampah di rumah-rumah siapa dan lain-lain. Sebenarnya penyebab utamanya itu karna ada beberapa unit usaha yang sulit kami jalankan, melihat hal itu ada beberapa orang yang minta mereka kelola secara pribadi tetapi atas nama BUMDes nanti dari pendapatannya BUMDes dapat persen lahir, tapi yang minta itu bukan hanya satu orang, ada beberapa yang minta dan mereka maunya kelola sendiri-sendiri tidak mau kerja sama, katanya sendiripun mereka bisa kerjakan lah. Nah karna saya juga tidak mau ada yang kecewa nanti makanya satupun tidak ada yang saya setujui, mulai dari situ mereka satu persatu mulai mengundurkan diri” (Wawancara 16 September 2024, pukul 15.40 WIB).

Tentu hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan program Pengelolaan Sampah yang telah disepakati termasuk mempengaruhi capaian-capaian yang telah disepakati sebelumnya. Terkendalinya program ini menyebabkan proses pengambilan sampah di rumah-rumah masyarakat menjadi terhambat dan menuai protes dan kritikan dari

masyarakat, hal ini disampaikan oleh Ibu Hania dan Ibu Rahma memberikan tanggapan yang sama terhadap hal ini:

“Diawal itu BUMDes selalu menjemput sampah depan rumah, biasa dalam satu bulan itu sampai tiga kali mereka jemput, tapi tahun kemarin itu tidak pernah mereka jemput. Makanya sampahku itu saya buang sendiri ke laut atau yang plastik sama daun-daun itu saya bakar kalau tidak hujan. Iyaa betul itu, kalau misalnya sampahnya tidak dijemput yaa jangan mereka menagih iuran sampah, ini tidak dijemput sampahnya masih juga ditagih juga, pasti kami tidak bayar kalau begitu. Kan jelas itu yang disampaikan pas pertemuan di balai desa, pak Kades bilang kan sampahnya akan dijemput makanya dipungut iuran, kalau tidak dijemput pasti tidak perlu bayar kan. Sudah kami sampaikan ke Pak Kades, Pak Sekdes juga kalau sampahnya kami itu tidak dijemput makanya kami tidak bayar iuran” (Wawancara 19 September 2024, pukul 16.35 WITA).

Menanggapi permasalahan diatas, hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Kore Samsudin dan Bapak Hang Burhan:

“Mereka itu (BUMDes) setiap ditanya selalu bilang lagi minus dana. Kan kemarin pas rapat evaluasi BUMDes itu ditanya juga sama masyarakat mengenai usaha yang mereka jalankan apa saja, termasuk juga ditanya kenapa sebagian masyarakat sampahnya diambil sebagian tidak, mereka jawab karna mines anggaran jadi tidak bisa diangkut semuanya, habis uang karna sewa mobil, dll. Padahal mereka dapat dana juga dari desa, dari CSR juga ada kalau tidak salah itu. Anak-anak pemuda saja kemarin pengajuan proposal kegiatan lomba mereka tidak kasi, padahal mereka itu badan usaha di desa. Saya juga heran, badan usaha tapi rugi” (Wawancara 22 September 2024, pukul 21.12 WITA).

Hal ini juga lebih lanjut disampaikan oleh mantan Sekretaris Desa Keurea:

“Mengenai laporan dari masyarakat itu sudah sangat banyak, ada yang melapor kalau sampahnya itu tidak pernah lagi dijemput sampai empat bulan tapi masih terus diminta iurannya setiap bulan, ada yang melapor kalau di lahan kosongnya sudah dipakai masyarakat untuk buang sampah sembarang, bermacam-macam pokoknya laporan yang masuk mengenai sampah ini. Pasti kami lakukan evaluasi terhadap BUMDes, kemarin misalnya pas dilakukan rapat evaluasi BUMDes, kami sudah sampaikan kalau misalnya pergi menjemput sampah itu harusnya masyarakat yang sampahnya dijemput harus didata biar ketahuan mana yang dijemput mana yang tidak, supaya nanti ketika penagihan iuran tidak ditagih itu masyarakat yang sampahnya tidak dijemput, termasuk juga petugas sampahnya itu personilnya ditambah biar lebih efektif penjemputan sampahnya. Kan ada dana dari iuran sampah itu yang bisa dipakai untuk gaji petugas sampah. Maksut saya kalau misalnya seluruh sampah-sampah masyarakat dijemput, otomatis jumlah tagihan iuran juga bertambah kan” (Wawancara 15 Oktober 2024, pukul 20.10 WITA).

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas bahwasanya kepercayaan dan komitmen, serta kesepahaman bersama sangat penting dalam proses kolaborasi, dimana

hal tersebut dapat menjadi acuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang saling berkaitan dalam menjalankan program Pengelolaan Sampah sebagaimana yang telah direncanakan dan disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tentu permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi kepercayaan dan komitmen dari masyarakat, hal tersebut juga mempengaruhi stakeholder lain yang telah percaya dan berkomitmen dalam upaya penganganan permasalahan sampah di Desa Keurea. Misalnya dari sisi Dunia Usaha, dengan mengetahui permasalahan internal dari eksekutor program Pengelolaan Sampah dalam ini BUMDes tentu menjadi pertanyaan bagi mereka mengenai keseriusan BUMDes dalam upaya penanganan permasalahan sampah di Desa Keurea.

Sangat disayangkan bubarnya kepengurusan BUMDes tersebut, mengingat upaya membangun komitmen dan kepercayaan bersama serta kesepahaman bersama yang telah dilakukan termasuk juga Pengelolaan Sampah yang telah dijalankan diawal tentu sangat membawa dampak positif terhadap penanganan permasalahan sampah yang ada di Desa Keurea. Berdasarkan informasi-informasi dan dokumen yang didapatkan peneliti mengenai keberlanjutan Pengelolaan Sampah di Desa Keurea, hari ini dengan kepengurusan BUMDes yang baru mereka berupaya dan berkomitmen untuk mengoptimalkan kembali pelaksanaan program Pengelolaan Sampah, hal tersebut dapat dilihat dengan penambahan-penambahan prasarana serta karyawan pengangkut sampah dalam menunjang keberlangsungan dan pengoptimalan program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea.

Disini peneliti menyimpulkan bahwa sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dimana berbagai stakeholder ini tergabung dalam program Pengelolaan Sampah yang membawa peran masing-masing dan saling bekerja sama dalam upaya penanganan permasalahan sampah di Desa Keurea. Tentu alasan suatu organisasi

melakukan kolaborasi, karena jika berkolaborasi keuntungan yang didapatkan akan lebih besar dan lebih optimal dibandingkan dengan bekerja sendiri-sendiri.

Di Desa Keurea sendiri untuk mencapai kolaborasi dalam upaya penanganan permasalahan sampah, ternyata dilakukan melalui dialog tatap muka secara langsung yang diinisiasi oleh Sekretaris Desa Keurea. Pada awalnya pertemuan tatap muka secara langsung dalam rangka untuk membahas permasalahan sampah di Desa Keurea sekaligus upaya dalam penanganannya. Pertemuan tersebut dilakukan di Aula Kantor Desa Keurea dan Kantor Desa Keurea secara intensif sesuai dengan kesepakatan disetiap pertemuan tatap muka yang dilakukan. Kemudian dalam konteks kepercayaan dan komitmen serta pemahaman bersama, peneliti menemukan bahwa kepercayaan telah terbangun pada beberapa stakeholder yang diawal terlibat dalam merencanakan program Pengelolaan Sampah. Hal ini ditunjukan dengan pertemuan tatap muka yang dilakukan termaksut kesepakatan yang dihadirkan oleh beberapa stakeholder.

Bertolak dari hal tersebut, membangun kepercayaan dan komitmen serta pemahaman bersama antar stakeholder dapat ditemukan pada upaya mengkomunikasikan beberapa kesepakatan tersebut melalui rapat sosialisasi secara langsung yang dilakukan pemerintah Desa Keurea dalam upaya mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder. Sosialisasi yang dilakukan ini tentu bertujuan untuk menginisiasi pemahaman bersama, dimana pemahaman bersama yang dibangun tentunya terkait dengan program Pengelolaan Sampah. Sebagai hasil pertemuan dari Pemerintah Desa dengan setiap stakeholder dihasilkan suatu kesepakatan bersama. Adapun hasil kesepakatan tersebut dinilai perlunya melibatkan berbagai stakeholder dalam program Pengelolaan Sampah. Dimana stakeholder yang terlibat misalnya Dunia Usaha, Komunitas dan Masyarakat Desa Keurea secara umum.

Selain pada keterlibatan, program Pengelolaan Sampah tentu juga membutuhkan dukungan dari berbagai stakeholder. Dukungan dari berbagai stakeholder yang dimaksut berupa dukungan materil ataupun pengadaan sarana dan prasarana dari Dunia Usaha dan komitmen serius dari berbagai stakeholder dalam rangka membantu tercapainya tujuan program Pengelolaan Sampah dalam upaya penanganan permasalahan sampah di Desa Keurea. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap stakeholder khususnya Masyarakat Desa Keurea tentunya sangat sepakat dengan dilaksanakannya program Pengelolaan Sampah ini, diman hal tersebut dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam mengikuti pertemuan-pertemuan yang diadakan termasuk menyepakati mengenai biaya iuran sampah yang ditentukan, mengingat permasalahan sampah ini tentu menghadirkan ketidak nyamanan bagi masyarakat mulai dari berserakannya sampah dan bau busuk yang dihadapi masyarakat, tentu hal tersebut akan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat Desa Keurea nantinya. Disamping itu, antusias ini juga ditunjukkan oleh upaya dari Komunitas ataupun Organisasi yang berfokus di bidang lingkungan yang menggerakan masyarakat untuk selalu melakukan aksi bersih sampah dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.

B. Peran Setiap Aktor Dalam Tahapan Kolaborasi yang diakukan Pemerintah Desa Keurea

Dalam rangka kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, pemetaan untuk melihat peran setiap aktor atau stakeholder pada suatu program atau kebijakan merupakan upaya dalam memastikan pencapaian tujuan program, apakah program yang dilaksanakan dapat berlangsung secara baik, sesuai peran dan kepentingan setiap stakeholder. Pada pemetaannya, tentu setiap aktor atau stakeholder mempunyai posisi yang sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan keberhasilan sebuah program atau kebijakan.

Pemetaan stakeholder merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui peran dari setiap stakeholder yang terlibat serta untuk memastikan pencapaian suatu program, sama halnya pada program Pengelolaan Sampah. Pada pemetaan stakeholder program pengelolaan sampah disini peneliti mengacu pada pengklasifikasian dari (Kismartini & Yusuf, 2015); (Rahmawati & Mussadun, 2017). Sehingga dalam program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea, stakeholder diklasifikasikan menjadi stakeholder primer, stakeholder sekunder dan stakeholder kunci.

Stakeholder primer dalam penelitian ini mencakup Masyarakat desa. Masyarakat desa merupakan sasaran utama dalam program pengelolaan sampah di Desa Keurea. Disamping itu Masyarakat desa juga menjadi tonggak utama dalam program ini, karena masyarakat desa merupakan penghasil sampah. Dengan kata lain, jika pemerintah atau stakeholder mengupayakan program pengelolaan sampah dalam rangka upaya penanganan sampah di Desa Keurea namun Masyarakat desa tidak memiliki kenginan untuk bergerak atau ikut serta dalam upaya penanganan, maka program tersebut tidak akan berjalan secara maksimal.

“Untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi hari ini di Desa Keurea, tentu itu bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah desa saja tetapi itu kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk masyarakat Desa Keurea yang merupakan penghasil sampah. Apa lagi ketika kita berbicara bagaimana keberhasilan program ini, tentu keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Maka dari itu, diawali perencanaan serta pelaksanaan program ini kami berharap agar mari kita bersama-sama menjalankan program ini agar permasalahan sampah di Desa Keurea dapat teratasi sebagaimana yang kita harapkan bersama” (Mantan Sekretaris Desa Keurea/Tokoh Masyarakat, Bapak Amruddin, 15 Oktober 2024 pukul 20.30 WITA)

Adapun kegiatan yang dilakukan Masyarakat desa yaitu bekerja sama dengan eksekutor pengelolaan sampah, mulai dari membiasakan membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan, ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea.

Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan peranya dalam upaya penanganan masalah sampah di Desa Keurea, diaman masih banyak masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat seperti di sungai, di pantai bahkan di pinggiran-pinggiran jalan yang diaman hal tersebut telah dilarang serta telah ada kesepakatan untuk tidak membuang sampah disembarang tempat.

Stakeholder sekunder merupakan aktor yang ikut terlibat dalam mendukung program Pengelolaan Sampah meskipun tidak mempunyai kepentingan langsung dalam program tersebut. Aktor yang terlibat pada saat peneliti turun kelapangan seperti Organisasi Pecinta Lingkungan Hidup AGATHIS, Komunitas Gondrong Morowali, Forel, Forum Komunikasi Hijau, Enviro PT. IMIP dan KKPG.

“Kami selaku Organisasi Pencinta Lingkungan Hidup yang pada dasarnya konsen terhadap lingkungan, dengan melihat kondisi permasalahan sampah yang ada pasti tergerak untuk berupaya melakukan penanganan walaupun yang kami lakukan hari ini bisa dibilang bukan merupakan jawaban utama untuk mengatasi permasalahan sampah. Yaa kami melakukan aksi bersih sampah ini bersama teman-teman komunitas hampir setiap bulan dan bukan hanya di Desa Keurea, kami juga melakukannya di Desa-desa lain yang seperti desa Fatufia, Labota dan Bahodopi” (Ketua OPLH Agathis, Saudara Rian Adiputra, 30 Oktober 2024)

Pada dasarnya stakeholder tersebut memberikan bantuan terhadap program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea mulai dari pelatihan, pendampingan serta aksi bersih sampah disetiap bulan dalam menopang kemajuan program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea. Disisi lain, dalam hal peran pihak perusahaan, disini perusahaan telah melakukan perannya dengan memberikan bantuan sarana dan prasarasa melalui program IMIP peduli serta bantuan pendanaan melalui CSR PT.IMIP.

Stakeholder kunci pada program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea mencangkup Kepala Desa Keurea, Sekretaris Desa Keurea, para Kepala Dusun Desa Keurea, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes. Beberapa stakeholder kunci tersebut memiliki

kewenangan secara legal dalam membuat keputusan dalam penyelenggaraan program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea.

“Selaku Pemerintah Desa Keurea, kami terus berupaya membangun relasi dan komunikasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Keurea ini untuk mendapatkan support/bantuan dari mereka. Dalam program Pengelolaan Sampah ini pasti sangat membutuhkan pendanaan yang cukup besar, mulai dari pengadaan TPS, mobil pengangkut sampah, kontainer sampah dan lain-lain yang tentunya tidak dapat Pemerintah Desa selesaikan sendirian dari segi pendanannya. Nah itulah tujuan kami membangun relasi dan komunikasi tersebut sehingga perusahaan-perusahaan yang ada ini dapat membantu kami secara langsung ataupun melalui CSR yang mereka berikan kepada Desa Keurea” (Mantan Sekretaris Desa Keurea/Tokoh Masyarakat, Bapak Amruddin, 15 Oktober 2024)

Dalam hal ini Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Ketua BUMDes mempunyai peran dalam penetapan kebijakan induk yakni kebijakan strategis yang mengarah pada sinkronisasi, harmonisasi dan kolaborasi program Pengelolaan Sampah. Sementara itu, Ketua BUMDes dan Sekretaris BUMDes memiliki peran dalam memotivasi, mengatur, mengawasi, dan melaksanakan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah, serta mengordinasikan hasil tersebut pada Pemerintah Desa Keurea.

Disini peneliti menyimpulkan bahwa peran aktor atau stakeholder dalam program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea terbagi menjadi tiga, yaitu stakeholder primer, stakeholder sekunder dan stakeholder kunci. (a) dimana stakeholder yang tergolong dalam stakeholder primer yaitu masyarakat Desa Keurea itu sendiri yang merupakan sasaran utama dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea. (b) kemudian stakeholder sekunder, merupakan aktor yang terlibat pada saat peneliti turun kelapangan seperti Organisasi Pecinta Lingkungan Hidup AGATHIS, Komunitas Gondrong Morowali, Forel, Forum Komunikasi Hijau, Enviro PT. IMIP dan KKPG. Meskipun mereka tidak mempunyai kepentingan langsung dalam program tersebut. (c) yang terakhir yaitu stakeholder kunci, stakeholder yang tergolong dalam stakeholder kunci ini memiliki kewenangan secara legal terhadap pembuatan keputusan dalam penyelenggaraan

program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea. Dimana stakeholder tersebut terdiri dari Kepala Desa Keurea, Sekretaris Desa Keurea, para Kepala Dusun Desa Keurea, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea

Keberhasilan ataupun kegagalan suatu program tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, entah itu faktor pendukung yang dapat menunjang keberhasilan program tersebut ataupun faktor penghambat yang dapat menggagalkan ataupun ketidak optimalan keberlangsungan suatu program. Disini peneliti akan menjelaskan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea.

1. Faktor Pendukung

Mengenai faktor pendukung dalam Program Pengelolaan Sampah, peneliti menemukan bahwa Dalam program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea, yang menjadi faktor pendukung yaitu : (a) Pertama, rasa kepedulian dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada BUMDes Anunto sebagai eksekutor atau pelaksana dari program Pengelolaan Sampah ini, hal itulah yang selalu menjadi motivasi buat kami agar terus melaksanakan program program ini dengan optimal sesuai kapasitas yang kami miliki. (b) Kedua, support dari masyarakat mengenai pendanaan operasional pelaksanaan program Pengelolaan Sampah ini, dana tersebut tentu bersumber dari prngumpulan iuran sampah masyarakat, dalam hal ini masyarakat tentu sangat mensupport program ini terlihat dari kepatuhan dalam membayar iuran sampah disetiap bulannya.

“Untuk faktor pendukung, sudah pasti karena tanggung jawab yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan program ini, kemudian support masyarakat juga yang setiap kami melakukan penagihan ke rumah-rumah selalu melakukan pembayaran tanpa ada penunggakan. Karena dari iuran itu kami bisa

membayar gaji orang-orang yang kami pekerjakan untuk mengangkut sampah. Saya juga yakin kalau program ini jika dikelola dengan baik pasti menghasilkan nilai ekonomi terhadap Desa Keurea. Apa lagi sudah ada contoh di Desa Bahomakmur yang sudah punya TPS tetap dan mesin pencacah sampah, itu penghasilan mereka dari pengolahan sampah plastik bisa sampai ratusan juta setiap bulan” (Ketua BUMDes Desa Keurea, Hariadi, 16 September 2024)

(c) kemudian yang terakhir yaitu keseriusan pemerintah dalam upaya penanganan sampah di Desa Keurea hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan, dengan mencari solusi dari setiap permasalahan lapangan yang terjadi dalam pelaksanaan program Pengelolaan Sampah mulai dari membangun relasi dan komunikasi dengan pihak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam program Pengelolaan sampah ini. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BUMDes Anunto Desa Keurea.

Disini dapat dilihat mengenai faktor pendukung dalam program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea, mulai dari rasa tanggung jawab yang tinggi dari ketua BUMDes karena telah diberikan amanat oleh Pemerintah Desa serta tingkat pasrtisipasi masyarakat desa yang tinggi dengan selalu membayar iuran sampah yang dimana hal itu juga merupakan salah satu penopang keberlangsungan program Pengelolaan Sampah. Selain memberikan tanggung jawab, Pemerintah Desa Keurea juga selalu berupaya menemukan solusi dari kendala-kendala yang dihadapi BUMDes dalam pelaksanaan program ini, dengan membangun relasi serta komunikasi yang baik dengan berbagai pihak.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang dapat menyebabkan suatu program atau kegiatan tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Faktor penghambat tentu akan mempengaruhi orang atau kelompok dalam menerapkan atau melaksanakan suatu kegiatan. Mengenai faktor penghambat dalam program

Pengelolaan Sampah ini peneliti menemukan, (a) Pertama, cukup sulit untuk mencari orang-orang yang siap dan serius untuk direkrut sebagai petugas pengangkut sampah. (b) Kedua, kurangnya pemahaman dari setiap anggota terhadap tanggung jawab masing-masing yang menyebabkan kualitas kerja mereka serta rawan untuk terjadi perselisihan antar anggota. (c) lalu yang Ketiga yaitu masalah Penganggaran, penganggaran merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan program Pengelolaan Sampah ini, misalnya dalam hal pengadaan mobil pengangkut sampah, motor tiga roda pengangkut sampah di setiap dusun, kontainer sampah, bahkan sampai pada pengadaan TPS tetap dan mesin pencacah sampah. Semua hal tersebut merupakan sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua BUMDes Anunto Desa Keurea.

“Untuk faktor penghambat yang kami hadapi, pertama menemukan orang yang benar-benar serius untuk bekerja sebagai petugas sampah itu cukup sulit, dari pengalaman kami sudah beberapa orang yang kami rekrut itu hanya bertahan paling lama 3 bulan, ada juga yang cuman satu bulan. Karna kan sebagian mereka itu hanya menjadikan ini sebagai pekerjaan sampingan mereka sambil menunggu lamaran mereka diperusahaan diterima, kalau sudah diterima yaa mereka pasti keluar dari sini” (Wawancara 16 September 2024).

Mengenai faktor penghambat dalam program Pengelolaan Sampah, perekruit karyawan yang betul-betul serius untuk bekerja sebagai petugas pengangkut sampah memang cukup sulit mengingat lapangan pekerjaan yang tersedia cukup banyak, tentu hal ini yang menjadikan pekerjaan mengangkut sampah bukanlah menjadi pekerjaan yang akan banyak diminati orang sehingga kebanyakan mereka hanya menjadikan ini sebagai pekerjaan mengisi waktu sembari menunggu lamaran pekerjaan mereka diterima di perusahaan.

Dalam hal ini, mengenai faktor penghambat juga disampaikan oleh Kepala Desa Keurea, Husni Abdul Wahab.

“Kita bisa lihat pengurus BUMDes yang baru selain ketua BUMDes, pengurus yang lain kan tidak hanya bekerja di BUMDes saja, tetapi mereka ada juga yang bekerja di perusahaan. Bicara tentang faktor penghambat, tentu ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat untuk unit-unit usaha yang ada di BUMDes termasuk dalam program Pengelolaan Sampah” (Wawancara 14 Oktober 2024). Kemudian untuk faktor penghambat selanjutnya juga disampaikan oleh mantan Sekretaris Desa Keurea.

“Yaa mungkin masalah penganggaran, karena penganggaran dari desa untuk BUMDes ini tidak bisa setiap tahun dikeluarkan, kita juga di desa butuh pembangunan pastinya program-program pembangunan desa lebih diprioritaskan. jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang diajukan BUMDes, Pemerintah Desa berupaya memenuhi itu melalui pengajuan-pengajuan bantuan ke pihak perusahaan ataupun ke Dinas Lingkungan Hidup” (Wawancara 15 Oktober 2024).

Mengenai faktor penghambat diatas dalam program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea, peneliti menyimpulkan bahwa selain kurangnya pemahaman anggota mengenai tanggung jawab masing-masing, mengenai perekutan karyawan juga merupakan hambatan yang dihadapi BUMDes, karena selama ini banyak karyawan yang direkrut hanya bertahan sebentar saja dan kemudian mengundurkan diri, dalam hal ini menjadi karyawan pengangkut sampah hanya dijadikan pekerjaan sementara sembari menunggu panggilan dari pihak perusahaan ketika lamaran mereka diterima, kemudian masalah penganggaran yang merupakan permasalahan yang menjadi penyebab utama kurang optimalnya pelaksanaan program Pengelolaan Sampah ini, dimana mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan BUMDes untuk pengelolaan sampah ketika diajukan tentu membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk terealisasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Kolaborasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Proses Kolaborasi dalam program Pengelolaan Sampah di Desa, Peran Stakeholder, serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam program pengelolaan sampah di Desa Keurea, dapat disimpulkan proses kolaborasi tersebut diawal dijalankan cukup baik. Mulai dari Dialog tatap muka dalam program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea dilakukan untuk membentuk suatu pandangan yang sama antar stakeholder secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam perjalannya hal tersebut tidak lagi dilakukan secara intensif, pertemuan-pertemuan yang dilakukan hanya terjadi antara internal Pemerintah Desa saja. Lalu dalam hal membangun kepercayaan dan komitmen, tentunya berangkat dengan suatu kesepakatan bersama mengenai penunjukan tim pelaksana atau eksekutor yang dibentuk dalam hal ini BUMDes yang akan menjalankan program tersebut. Dengan BUMDes sebagai eksekutor dalam pelaksanaan program ini, tentu hal tersebut menumbuhkan kepercayaan dan komitmen serta partisipasi dari masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Dalam rangka pencapaian tujuan program Pengelolaan Sampah, pada tahapan ini terjadi juga kesepahaman bersama antar stakeholder. Terbentuknya kesepahaman bersama, tentu tidak terlepas dari adanya tahapan-tahapan sebelumnya yang telah dijalankan. Selain itu, hal ini juga ditopang dengan adanya dukungan-dukungan nyata dari setiap stakeholder seperti bantuan dana CSR dari pihak perusahaan. Walaupun dalam prakteknya dana CSR tersebut lebih prioritas dialokasikan pada pembangunan fisik ketimbang dialokasikan pada

upaya-upaya penanganan permasalahan sosial dan lingkungan. Terakhir, dengan adanya ketiga tahapan diatas proses kolaborasi yang dilakukan untuk mewujudkan program Pengelolaan Sampah telah terbangun hasil sementara. Dimana, pada tahapan hasil sementara yang terbangun telah menghasilkan dinamika yang positif dalam upaya penanganan permasalahan sampah di Desa Keurea. Hal ini tentu ditunjukan dengan terbentuknya tujuan dalam penanganan permasalahan sampah melalui program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea yang telah disepakati secara bersama. Dimana tujuan tersebut ialah Pengadaan TPS Sementara, Pengadaan Drum Sampah, Pengadaan Truk Pengangkut sampah serta Penentuan Iuran Sampah, yang telah disesuaikan dengan kondisi lapangan serta aspirasi-aspirasi dari setiap stakeholder. Dengan adanya runutan atas tujuan tersebut, telah menjadi program yang saling bersinergi dalam Pengelolaan Sampah Desa Keurea serta memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanganan permasalahan sampah yang terjadi di Desa Keurea.

2. Peran Stakeholder

Peneliti melihat bahwa peran aktor atau stakeholder dalam program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea terbagi menjadi tiga, yaitu stakeholder primer, stakeholder sekunder dan stakeholder kunci. (a) dimana stakeholder yang tergolong dalam stakeholder primer yaitu masyarakat Desa Keurea itu sendiri yang merupakan sasaran utama dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea. (b) kemudian stakeholder sekunder, merupakan aktor yang terlibat pada saat peneliti turun kelapangan seperti Organisasi Pecinta Lingkungan Hidup AGATHIS, Komunitas Gondrong Morowali, Forel, Forum Komunikasi Hijau, Enviro PT. IMIP dan KKPG. Meskipun mereka tidak mempunyai kepentingan langsung dalam program tersebut. (c) yang terakhir yaitu stakeholder kunci, stakeholder yang tergolong dalam

stakeholder kunci ini memiliki kewenangan secara legal terhadap pembuatan keputusan dalam penyelenggaraan program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea. Dimana stakeholder tersebut terdiri dari Kepala Desa Keurea, Sekretaris Desa Keurea, para Kepala Dusun Desa Keurea, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes.

Dengan adanya semua tahapan-tahapan dalam proses kolaborasi tersebut, tentu melihat peran setiap stakeholder sangatlah penting dalam upaya mewujudkan program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea. Melihat pelaksanaan serta keberlangsungan program Pengelolaan Sampah ini, peneliti melihat ada satu proses dalam tahapan kolaborasi yang pelaksanaannya perlu untuk lebih intens dilakukan, dimana proses tersebut adalah evaluasi. Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, mengingat permasalahan-permasalahan yang dihadapi BUMDes selaku eksekutor dalam program ini tentu sangatlah kompleks. Proses evaluasi ini dilakukan dengan maksut untuk mencegah terjadinya ketidak sepahaman antar stakeholder ataupun internal eksekutor itu sendiri yakni BUMDes, menghadirkan ide-ide atau solusi baru untuk menemukan jalan keluar guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga pelaksanaan program Pengelolaan Sampah terus berlangsung sesuai dengan kesepakatan dan tujuan bersama.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

mengenai faktor pendukung dalam program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea, mulai dari rasa tanggung jawab yang tinggi dari ketua BUMDes karena telah diberikan amanat oleh Pemerintah Desa serta tingkat partisipasi masyarakat desa yang tinggi dengan selalu membayar iuran sampah yang dimana hal itu juga merupakan salah satu penopang keberlangsungan program Pengelolaan Sampah. Selain memberikan tanggung jawab, Pemerintah Desa Keurea juga selalu berupaya

menemukan solusi dari kendala-kendala yang dihadapi BUMDes dalam pelaksanaan program ini, dengan membangun relasi serta komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Kemudian Mengenai faktor penghambat dalam program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea, peneliti menyimpulkan bahwa selain kurangnya pemahaman anggota mengenai tanggung jawab masing-masing, mengenai perekrutan karyawan juga merupakan hambatan yang dihadapi BUMDes, karena selama ini banyak karyawan yang direkrut hanya bertahan sebentar saja dan kemudian mengundurkan diri, dalam hal ini menjadi karyawan pengangkut sampah hanya dijadikan pekerjaan sementara sembari menunggu panggilan dari pihak perusahaan ketika lamaran mereka diterima, kemudian masalah penganggaran yang merupakan permasalahan yang menjadi penyebab utama kurang optimalnya pelaksanaan program Pengelolaan Sampah ini, dimana mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan BUMDes untuk pengelolaan sampah ketika diajukan tentu membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk terealisasi.

B. Rekomendasi

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dalam penelitian ini sejatinya masih ditemukan keterbatasan dan kekurangan yang tentunya harus dilengkapi dari sudut pandang kajian berikutnya, bisa merujuk pada penelitian skripsi ataupun bentuk penelitian lainnya. Berdasarkan pada pengkajian dan temuan-temuan dalam penelitian ini, maka dari itu untuk mengembangkan program Pengelolaan Sampah dalam upaya penanganan permasalahan sampah secara berkelanjutan, maka peneliti merancang beberapa rekomendasi yang ditawarkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Keurea

- a. Secara spesifik perlu adanya kebijakan dalam perencanaan kolaboratif yang dihadirkan dalam bentuk Perdes, dimana kebijakan tersebut harus terus dikembangkan dan dilakukan evaluasi secara bertahap. Sehingga pemerintah dapat menselaraskan atau menggabungkan gagasan-gagasan dari berbagai stakeholder khususnya masyarakat dalam rangka menuju keberlanjutan program Pengelolaan Sampah dalam mengatasi permasalahan sampah di Desa Keurea. Tentu manfaat dari kebijakan ini kedepannya akan menghadirkan sinkronisasi pelaksanaan program dan permasalahan lapangan sehingga mengarahkan program kearah yang lebih baik.
 - b. Praktik-praktik baik yang telah ditemukan pada program Pengelolaan Sampah dalam upaya penanganan permasalahan sampah perlu dipertahankan. Dimana hal ini tentunya sebagai penunjang perbaikan kinerja program kearah yang lebih maksimal. Hal-hal seperti sosialisasi dan pelatihan termasuk juga pendampingan yang berkelanjutan, terus dipertahankan guna terwujudnya sebuah kesepahaman yang kuat diantara stakeholder.
 - c. Dari beberapa rekomendasi diatas, mengenai kebijakan yang dirumuskan dalam Perdes yang mengatur tentang program Pengelolaan Sampah tentu, Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa perlu menggencarkan terus-menerus kepada berbagai stakeholder khususnya memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Keurea secara berjenjang sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan komitmen yang mengarah pada suatu pemahaman yang sama secara konsisten untuk keberlanjutan program Pengelolaan Sampah.
2. Bagi Stakeholder Lainnya
 - a. Setiap stakeholder khususnya Masyarakat Desa Keurea, untuk selalu pro-aktif dan partisipatif dalam kerjasama yang dibangun dengan pihak eksekutor

program Pengelolaan Sampah. Dalam hal ini masyarakat harus siap selalu untuk memberikan masukan sesuai fakta lapangan, ketika pada pelaksanaan program Pengelolaan Sampah tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Mengingat program ini sangat berdampak baik bagi masyarakat, tentu dengan adanya masukan-masukan ini tentu kedepannya akan memberikan dampak positif pada pelaksanaan program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea.

- b. Bagi Dunia Usaha dan Komunitas, mengenai kerjasama yang telah dibangun dua stakeholder ini yakni dunia usaha dan komunitas, harus lebih partisipatif dalam hal pengawasan dan pendampingan. Dalam hal ini, tidak hanya berhenti pada tahap memberikan bantuan sarana dan prasarana serta edukasi tetapi harus lebih terlibat dalam pengawasan dan pendampingan sehingga terjadi penguatan hubungan kordinasi. Tentu hal ini sangat perlu untuk dilakukan guna mencapai optimalisasi pelaksanaan program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea.
 - c. Bagi Badan Usaha Milik Desa BUMDes Anunto, terkhusus Ketua BUMDes dalam pembagian kerja terhadap anggota pengurus harus disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing anggota pengurus sehingga mereka paham dan mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing, selalu siap menjadi penengah atau memberikan pemahaman ketika terjadi ketidak sepahaman antar anggota, serta selalu melakukan pembahasan internal ataupun bersama seluruh stakeholder mengenai implementasi pelaksanaan program ketika dalam pelaksanaan ada yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Hal ini tentu bertujuan agar pelaksanaan program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea berjalan sesuai dengan kesepakatan dan tujuan bersama.
3. Bagi Penelitian Berikutnya

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan, maka diperoleh beberapa peluang penelitian selanjutnya. Peluang penelitian selanjutnya dapat dilakukan terhadap proses kolaborasi pada program Pengelolaan Sampah dalam jangka menengah dan jangka panjang. Mengingat dalam program ini tidak dilakukan pengkajian pada jangka menengah dan panjang untuk melihat secara keseluruhan keberhasilan dari proses kolaborasi yang dilakukan pada program ini. Sehingga diupayakan pengkajian lebih lanjut terkait proses kolaborasi antar stakeholder dalam program Pengelolaan Sampah terkhusus dalam melihat keberhasilan jangka menengah dan jangka panjang.

Kemudian peneliti selanjutnya juga tidak hanya melihat program Pengelolaan Sampah dalam jangka pendek dan jangka panjang saja, namun peneliti selanjutnya juga harus secara general menganalisis bentuk kolaborasi dalam upaya penanganan permasalahan sampah di Desa Keurea. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini peneliti hanya menjelaskan proses kolaborasi antar stakeholder dalam program Pengelolaan Sampah di Desa Keurea.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris, & Gash, A. (2008) *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Pemerintah Desa Keurea (APBDes), Tahun 2023.
- ARTHA, Alfian Deby, et al. Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2023, 7.1: 25-36.
- BPS Morowali, 2023. Jumlah penduduk Morowali pada 2022 mencapai 176.244 Jiwa Hasil Wawancara dengan DLHD Morowali. 13 Juni 2023 pada pukul 10.00.
- CHOTIMAH, Hidayat Chusnul; ISWARDHANA, Muhammad Ridha; RIZKY, Lucitania. Model *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2021, 27.3: 348-376.
- CRESWELL, J. W. (2002). Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, Jakarta: KIK, 121-180.
- DAMANHURI, Enri; PADMI, Tri. Pengelolaan sampah. Diktat kuliah TL, 2010, 3104: 5-10.
- DLHD Morowali, 2022. Jumlah Timbulan Sampah Residu mencapai 101,784 Ton Pertahun.
- DLHD Morowali, 2022. Laporan Timbulan Sampah Pada Setiap Sub-sektor.
- DLHD Morowali, 2022. Jumlah Timbulan Sampah Mengalami Peningkatan Setiap Tahunnya (2014 mencapai 19.868 Ton dan 33.791 Ton di 2022).
- Dokumen Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ANUNTO Desa Keurea Tahun 2023.
- Dwiyanto, Ilmu Administrasi Publik di Indonesia: Mencari Identitas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hal. 53-70.
- FIRMANSYAH, Imang, et al. *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TASIKMALAYA*. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 2023, 3.4: 50-55.
- GIMNASTIAR, Maulana Fajar, et al. IMPLEMENTASI *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN KALIPANCUR, KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG (BANK SAMPAH INDRIA JAYA)*. *Journal of Politic and Government Studies*, 2023, 13.1: 446-463.
- HARMANA, Djogeh; WARGADINATA, Ella L.; NURDIN, Ismail. Pengelolaan Sampah Berbasis *Collaborative Governance* Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2021, 13.2: 247-260.
- HARDI, Warsono, et al. *Collaborative Governance* Dalam Perspektif Administrasi Publik. 2020.
- HIDAYAT, Syarif. Menimbang ulang konsep *good governance*: diskursus teoretis. Masyarakat Indonesia, 2018, 42.2: 151-165.

- IDRIS, Idris; HERDIANA, Dian; MUJTAHID, Iqbal Miftakhul. *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 2022, 6.3.
- IKRAM IKRAM, Mulkhaeri. Pendekatan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Kecamatan Manggala. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 2020, 3.1: 94-110.
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- JAHRO, Siti. *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari, dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan. 2018.
- Laporan Bulanan Jumlah Penduduk Pemerintah Desa Keurea, Bulan Juli Tahun 2024
- Laporan Bulanan Jumlah Penduduk Pemerintah Desa Keurea, Bulan Desember 2024
- MCL Mulyadi. Proses Pemberdayaan BP2MI DIY Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Di Desa Wisata Gorongan Wonokerto Sleman Yogyakarta. (E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023), hal. 4-19
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldan, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Shourcesbook*. SAGE Publications.
- MOLEONG, L. J. (2018) Metodologi Penelitian Kualitatif (38th ed). Bandung: Remaja Rosdakarya
- NABILA ZAHRA, Muliawati. Pengelolaan Sampah Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (*Waste Management in the Context of Waste Management*). 2021.
- NOOR, Mohammad; SUAEDI, Falih; MARDIYANTA, Antun. *Collaborative Governance* Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. 2022.
- PUSPITA, Tyas Ayu; WAHYUDI, Kelvin Edo. *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 2023, 5.3: 284-290.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Desa Keurea, Tahun 2023.
- Sabaruddin, A. (2015). *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik, Teori, Konsep dan Aplikasi*.
- SETIAWANDARI, Niluh Eka Putri; KRISWIBOWO, Arimurti. *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH*. Jurnal Kebijakan Publik, 2023, 14.2: 149-155.
- Undang-Undang RI. (2008), Tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 1, Pasal 6) Undang-Undangn Nomor 18 Tahun 2008, DKI Jakarta.
- WAHYUDIN, Cecep; SUBAGDJA, Oetje; ISKANDAR, Abubakar. Desain Model *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. Jurnal Governansi, 2023, 9.2: 151-162.

PEDOMAN WAWANCARA

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi

Kabupaten Morowali

A. Identitas Informan

Nama : _____

Alamat : _____

Jabatan : _____

B. Pertanyaan wawancara ini merujuk pada poin-poin yang ada dalam fokus penelitian :

1. Proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea.

- Bagaimana langkah awal yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea?
- Menurut anda dalam proses pengelolaan sampah di Desa Keurea, siapa saja aktor-aktor yang terlibat?
- Upaya apa yang dilakukan untuk mengembangkan pemahaman bersama antar aktor/stakeholder dalam mewujudkan kerjasama untuk menghadapi masalah-masalah terhadap pengelolaan sampah?
- Bagaimana kepercayaan dan komitmen yang terbangun dari setiap aktor/stakeholder dalam proses pengelolaan sampah?
- Apakah ada kebijakan yang tersedia dalam mewujudkan kerjasama antar aktor/stakeholder dalam proses pengelolaan sampah?

2. Peran setiap aktor dalam tahapan *Collaborasi Governance* yang dilakukan Pemerintah Desa Keurea.

- Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan kerjasama antar aktor/stakeholder dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea?
- Bagaimana peran setiap aktor/stakeholder yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah?
- Apakah peran tersebut telah menunjukkan kesesuaian dengan berjalannya kerjasama antar aktor/stakeholder dalam proses pengelolaan sampah

- Apakah aktor/stakeholder yang terlibat telah menunjukkan keterbukaannya untuk saling bekerjasama dalam proses pengelolaan sampah?
- Dalam proses pelaksanannya, apakah para aktor/stakeholder siap untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya yang dimilikinya?

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Desa Keurea.

- Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam proses pengelolaan sampah?
- Bagaimana dukungan tokoh masyarakat dalam proses pengelolaan sampah?
- Bagaimana dukungan kaum perempuan dalam proses pengelolaan sampah?
- Bagaimana dukungan tokoh pemuda terhadap proses pengelolaan sampah?
- Dalam proses membangun kepercayaan dan komitmen antar aktor/stakeholder, apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam prosesnya?
- Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut?
- Apakah langkah-langkah tersebut dapat dikatakan efektif dalam menghadapi hambatan tersebut?

LAMPIRAN

**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SENALI
PROGRAM STUDI PENDEKULURAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SENALI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SENALI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAISTER, STATUS TERAKREDITASI BAIK SENALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 136/I/U/2025
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali
Di tempat.

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama	:	Jeri Yanto
No Mhs	:	20520078
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	:	Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Tempat	:	Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali
Dosen Pembimbing	:	Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Februari 2025
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAKI SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAKI SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAKI SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 70/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Jeri Yanto
Nomor Mahasiswa : 20520078
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali
b. Sasaran : Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.



PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
KECAMATAN BAHODOPI
DESA KEUREA

Alamat: Jln Trans Sulawesi Desa Keurea No. Kode Pos 94974

SURAT KETERANGAN IZIN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HUSNI ABDUL WAHAB

Jabatan : Kepala Desa Keurea

Berdasarkan surat izin dari STPMD "APMD" Yogyakarta perihal permohonan izin dengan ini kami

menyetujui dan memberikan izin kepada:

Nama : JERI YANTO

NIM : 20520078

Untuk melakukan penelitian dengan judul "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di
Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah" dalam rangka penyusunan
skripsi di Desa Keurea.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dokumentasi Wawancara Kepala Desa Keurea



Dokumentasi Wawancara Sekretaris Desa Keurea



Dokumentasi Wawancara Ketua BUMDes Anunto



Dokumentasi Tumpukan Sampah Desa Keurea



Dokumentasi Tumpukan Sampah



Dokumentasi TPS

